



Katalog: 9301005

PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA MENURUT PENGELUARAN

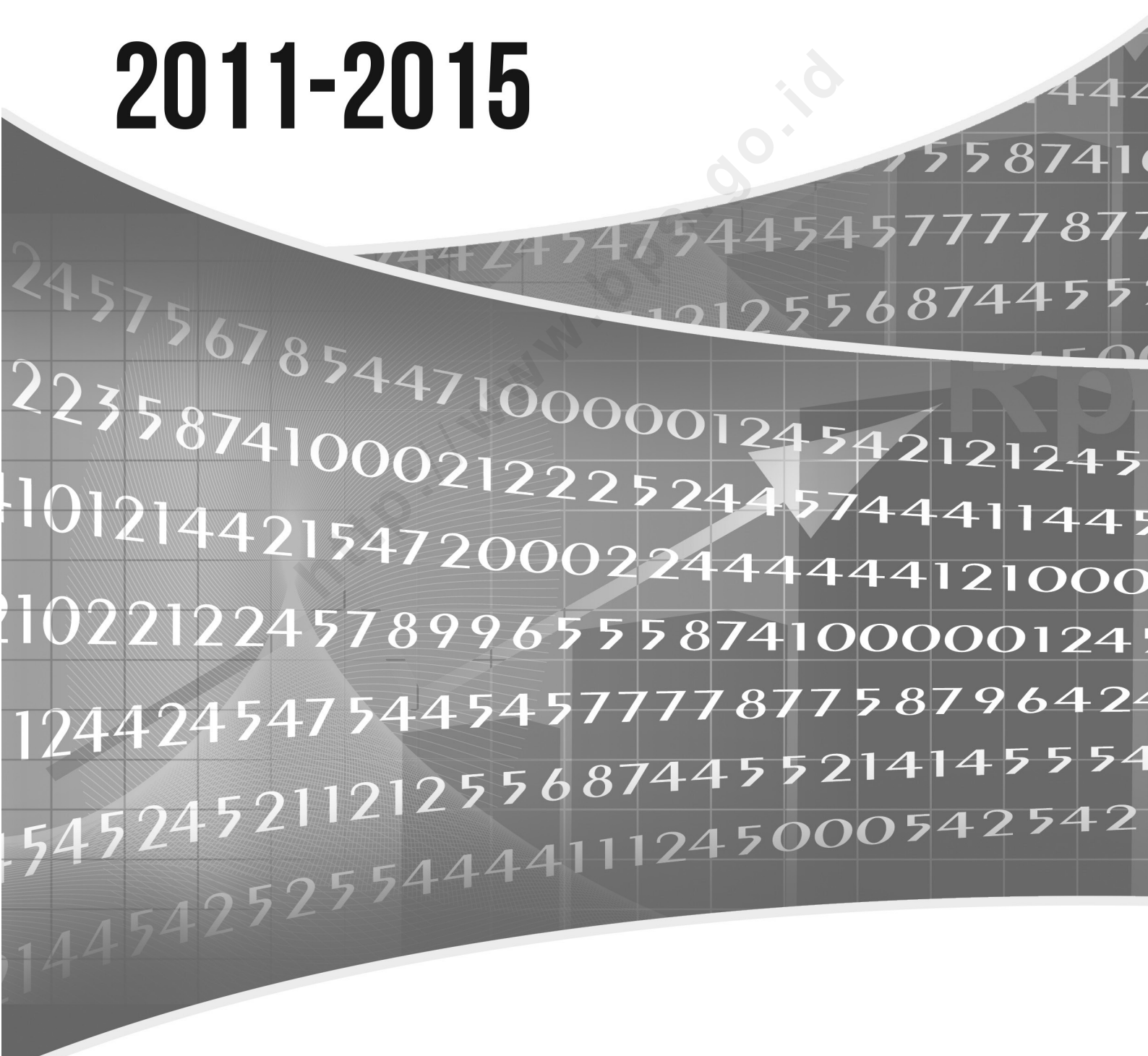
2011-2015



BADAN PUSAT STATISTIK

PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA MENURUT PENGELUARAN

2011-2015



PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA

MENURUT PENGELUARAN

TAHUN 2011- 2015

ISBN : 978-979-064-978-1
Katalog : 9301005
Nomor Publikasi : 07240.1601
Ukuran Buku : 28 x 21 cm
Jumlah Halaman : ~~IV~~ ~~III~~ halaman

Naskah
Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran

Gambar Kulit
Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan / atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah. Namun, perangkat data ini juga dapat digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, bahkan digunakan sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat peredaran uang, penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dsb.

Sampai saat ini, penghitungan PDB Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu dari sisi lapangan usaha (*industry*) dan sisi pengeluaran (*expenditure*), baik untuk periode tahunan maupun triwulanan. Pendekatan *pertama* menjelaskan agregat PDB yang terkait dengan penciptaan nilai tambah, yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha atau industri. Sebagian besar nilai tambah ini merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat, baik dalam bentuk upah dan gaji, pendapatan kapital, serta pendapatan atas pemilikan faktor produksi lain. Pendekatan *kedua* menjelaskan pengeluaran pendapatan baik untuk aktivitas konsumsi “akhir” dan investasi “riil”.

Publikasi “*Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran*” ini menyajikan data dan informasi tentang pendekatan PDB dari sisi pengeluaran untuk periode tahun 2011 - 2015, yang didasarkan atas dasar harga (adh) Berlaku maupun adh Konstan 2010.

Kami mengucapkan banyak terima kasih pada berbagai pihak yang telah mendukung penerbitan publikasi ini, semoga publikasi PDB ini banyak memberikan manfaat bagi para pengguna. Saran dan kritik sangat diharapkan agar publikasi PDB ini disajikan dengan lebih baik di masa yang akan datang.

Jakarta, Juni 2016

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



Dr. SURYAMIN, M.Sc.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN AGREGAT PDB INDONESIA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2011-2015.....	7
BAB III PERKEMBANGAN RINCIAN KOMPONEN-KOMPONEN PDB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2011-2015.....	15
3.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	15
3.2 Konsumsi Akhir LNPRT	20
3.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	21
3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	27
3.5 Perubahan Inventori	30
3.6 Ekspor Barang dan Jasa	32
3.7 Impor Barang dan Jasa	35
BAB IV AGREGAT PDB MENURUT PENGELUARAN DAN PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 2011-2015.....	39
4.1 PDB (Nominal)	39
4.2 Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Nasional	41
4.3 <i>Average Propensity to Consume & Average Propensity to Save</i>	46
4.4 Perbandingan Pengeluaran PDB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	47
4.5 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap	

	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	49
4.6	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDB	49
4.7	Perbandingan Ekspor Barang dan Jasa PDB terhadap PMTB	50
4.8	Perbandingan PDB terhadap Impor Barang dan Jasa	51
4.9	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	52
4.10	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	54
4.11	Rasio Perdagangan International (RPI)	55
4.12	Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri	57
4.13	Rasio Pendapatan Nasional (PN) terhadap PDB	58
4.14	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	60
BAB V	METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	63
5.1	Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	66
5.2	Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	70
5.3	Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	80
5.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	83
5.5	Perubahan Inventori	88
5.6	Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	94
5.7	Penyusutan (Depresiasi)	96
5.8	Pajak Tak Langsung (Netto)	97
5.9	Pendapatan Atas Faktor Produksi dari Luar Negeri	98
5.10	Transfer Berjalan (<i>Current Transfer</i>)	100
BAB VI	PENUTUP	101
	DAFTAR ISTILAH PENTING	103
	DAFTAR PUSTAKA	105
	LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015.....	7
Tabel 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015.....	9
Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015.....	11
Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015	13
Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015.....	14
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2011-2015.....	16
Tabel 7. Struktur dan Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2011-2015.....	19
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPR T Tahun 2011-2015	21
Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2011-2015.....	23
Tabel 10. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Indonesia Tahun	

2011-2015.....	25
Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Indonesia Tahun 2011-2015.....	28
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2011-2015	31
Tabel 13. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2011-2015.....	34
Tabel 14. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Tahun 2011-2015.....	37
Tabel 15. PDB dan PDB Perkapita Tahun 2011-2015.....	40
Tabel 16. PDB, Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposable Nasional Perkapita Tahun 2011-2015.....	44
Tabel 17. <i>Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save</i> Tahun 2011-2015.....	47
Tabel 18. Perbandingan PDB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Tahun 2011-2015.....	48
Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2011-2015.....	49
Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDB Tahun 2011-2015.....	50
Tabel 21. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2011-2015.....	51
Tabel 22. Rasio PDB terhadap Impor Tahun 2011-2015.....	52

Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Tahun 2011-2015.....	53
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2011-2015.....	54
Tabel 25.	Rasio Perdagangan Internasional Tahun 2011-2015.....	56
Tabel 26.	Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri Tahun 2011-2015.....	57
Tabel 27.	Rasio Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposable PDB Tahun 2011-2015.....	58
Tabel 28.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Tahun 2011-2015	61

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015.....	8
Grafik 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010) Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015	9
Grafik 3. Perbandingan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHB dan ADHK 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015.....	10
Grafik 4. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015	12
Grafik 5. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015.....	13

BAB I PENDAHULUAN

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran atau penggunaan dan PDB menurut lapangan usaha merupakan suatu bentuk tampilan data ekonomi makro, di samping bentuk tampilan lain seperti Tabel Input-Output (I-O), Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana (NAD). PDB pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) atas penggunaan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan melalui proses produksi. Dalam konteks tersebut, ukuran PDB dapat menggambarkan aktivitas dan hasil akhir dari suatu proses produksi yang berlangsung di dalam batas-batas teritori suatu negara atau wilayah. Berbagai agregat yang dapat diturunkan dari PDB, di antaranya adalah permintaan konsumsi akhir, pembentukan modal tetap atau investasi fisik, ekspor dan impor. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan akhir berbagai pelaku atau sektor ekonomi domestik maupun luar negeri.

Penghitungan PDB melalui pendekatan pengeluaran, merupakan hal yang tidak terpisahkan dari penghitungan PDB melalui pendekatan lapangan usaha (industri), yang ditampilkan dalam suatu kerangka kerja data ekonomi. Sungguhpun demikian, penghitungan PDB pengeluaran dilakukan secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDB lapangan usaha lebih menjelaskan tentang proses produksi, serta pendapatan faktor yang berhasil diciptakan (balas jasa faktor produksi)¹, sedangkan PDB pengeluaran menjelaskan tentang pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Selain itu, melalui komponen pengeluaran atau permintaan akhir (*final demand*) atau disebut sebagai PDB menurut

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

pengeluaran, juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa dari domestik maupun impor (*supply side*). Melalui hubungan ini akan lebih mudah terlihat titik keseimbangan makro antara sisi “penyediaan dan permintaan”.

Secara konsep dijelaskan² bahwa, penghitungan PDB dari sisi yang berbeda dimaksudkan untuk : i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat perkiraan atau estimasi; ii) dapat memberi manfaat lebih dalam melakukan analisis PDB; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Meskipun secara teoritis kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*), tetapi karena perbedaan dalam pendekatan estimasi maupun metoda pengukuran, bilamana terjadi selisih atau diskrepansi statistik merupakan hal yang wajar.

Dengan demikian maka PDB pengeluaran (*expenditure*) menjelaskan tentang besaran nilai produk atau barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat. Secara spesifik yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan produk dalam bentuk barang atau jasa yang tujuannya tidak untuk diproses lebih lanjut (atau dikonsumsi habis), yang direalisasikan dalam bentuk pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, atau produk konsumsi akhir LNPR, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor barang dan jasa.

Di sisi lain, dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari negara lain (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya terkandung produk impor. Sehingga untuk mengukur besaran nilai tambah domestik (PDB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan

2 *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

dari hasil penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan yang tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, menjadi peluang masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa perdagangan produk impor terus berkembang dari waktu ke waktu, baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDB lapangan usaha (Y) punya total nilai yang sama besar dengan PDB pengeluaran (E), namun di dalam kenyataan tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antara keduanya juga berbeda. Dalam penyajian-nya, perbedaan tersebut diletakkan pada sisi PDB pengeluaran, yang kemudian disebut sebagai perbedaan statistik (*statistical discrepancy*). Unsur yang menyebabkan terjadi perbedaan, di antaranya adalah basis dan konsep pengukuran, metoda pendekatan, cakupan ukuran, serta sumber data yang digunakan. Adanya perbedaan tersebut diharapkan tidak menjadi masalah bagi para pengguna data PDB.

Penghitungan PDB dari sisi **pengeluaran**, dimaksudkan juga untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui berbagai ragam proses produksi (atau lapangan usaha) menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang pada gilirannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Atau pada sisi yang berbeda, PDB menurut pengeluaran juga menjelaskan tentang penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Hubungan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran untuk pembelian berbagai barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor (termasuk diekspor) merupakan bentuk analisis sederhana atas PDB, ditinjau dari dua pendekatan tersebut. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga-lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

kedua model pendekatan PDB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDB (lapangan usaha)
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan bahwa, pendapatan atau nilai tambah yang diperoleh dari penghitungan PDB menurut lapangan usaha “identik” dengan PDB menurut pengeluaran. Apabila Y adalah pendapatan dan C adalah konsumsi akhir, kemudian GFCF serta Δ Inventori menggambarkan investasi (fisik), maka selisih ekspor dikurangi impor mengekspresikan surplus atau defisit yang berasal dari perdagangan berbagai barang dan jasa dengan luar negeri. Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi akhir atau juga untuk investasi (khususnya fisik). Selain itu juga dapat diketahui seberapa besar ketergantungan ekonomi domestik (wilayah) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dengan impor disebut sebagai “ekspor neto” yang juga memberikan gambaran tentang tabungan luar negeri.

Sama halnya dengan pendekatan lapangan usaha, PDB sisi permintaan atau penggunaan akhir juga menurunkan agregat ekonomi makro seperti nilai nominal,

struktur, komposisi atau distribusi penggunaan akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit masing-masing komponen maupun keseluruhan PDB (E). Selain menurut masing-masing komponen pengeluaran, pada publikasi ini juga disajikan beberapa agregat makro lain yang berkaitan erat dengan PDB, seperti Pendapatan Nasional (*National Income*). Angka Pendapatan Nasional merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Selain itu disajikan juga data PDB per-kapita, untuk melihat ukuran pemerataan, baik rata-rata tingkat produktivitas, maupun tingkat kemakmuran masyarakat, secara individu.

Untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan PDB sisi pengeluaran dari waktu ke waktu, disajikan pula data runtun waktu (*time series*) dalam bentuk angka indeks (indeks berantai maupun perkembangan) dari masing-masing komponen penggunaan akhir, berikut agregat turunannya. Indeks berantai bermanfaat untuk melihat perubahan volume maupun harga antar dua titik waktu yang berurutan, sedangkan indeks perkembangan untuk melihat perubahan volume maupun harga secara kumulatif dalam satu periode tertentu. Indikator tersebut diturunkan dari hasil perhitungan PDB atas dasar harga Berlaku (*adh Berlaku*) maupun atas dasar harga Konstan (*adh Konstan*) 2010, dari tahun 2011 s.d 2015.

<http://www.bps.go.id>

BAB II

TINJAUAN AGREGAT PDB INDONESIA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2011 – 2015

Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang belum stabil. Secara tahunan, pertumbuhan tahun 2011 sampai dengan 2015 secara berturut-turut yaitu 6,17 persen, 6,03 persen, 5,56 persen, 5,02 persen dan 4,79 persen. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (*supply side*), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (*demand side*). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi ada pada kategori Informasi dan Komunikasi yang setiap tahunnya selalu tumbuh di atas 10 persen, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu didominasi oleh pergerakan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

**Tabel 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011 – 2015**

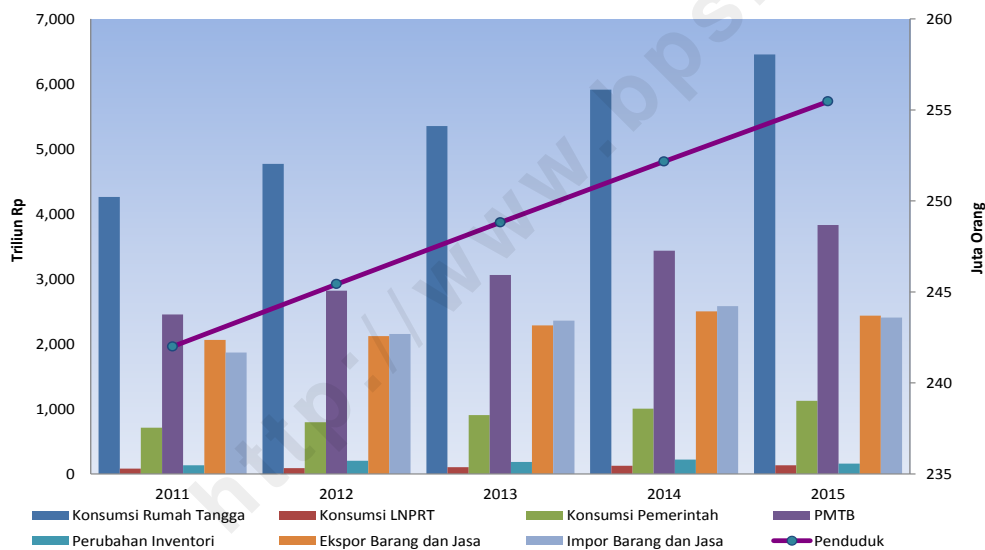
Uraian (1)	(Miliar Rp)				
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014* (5)	2015** (6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	4.260.075,5	4.768.745,1	5.321.087,6	5.915.741,7	6.453.205,5
2 Konsumsi LNPRT	80.529,9	89.585,8	103.929,0	124.242,0	130.936,0
3 Konsumsi Pemerintah	709.450,8	796.848,3	908.574,3	996.197,4	1.125.542,4
4 PMTB	2.451.914,0	2.819.026,5	3.051.496,2	3.442.026,9	3.829.978,4
5 Perubahan Inventori	131.328,6	202.638,4	178.090,5	210.407,1	158.753,9
6 Ekspor Barang dan Jasa	2.061.886,2	2.118.979,0	2.283.776,7	2.497.116,4	2.434.180,6
7 Impor Barang dan Jasa	1.868.075,0	2.152.937,0	2.359.212,1	2.580.527,1	2.405.762,4
8 Total PDB	7.831.726,0	8.615.704,5	9.546.134,0	10.565.817,3	11.540.789,8
Diskrepani Statistik ⁴	4.616,0	-27.181,5	58.391,9	-39.387,1	-186.044,6

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

⁴ Perbedaan antara total PDB Lapangan Usaha dan PDB Pengeluaran

Dalam kurun waktu tahun 2011-2015, nilai PDB Indonesia atas dasar harga (adh) Berlaku menunjukkan peningkatan cukup signifikan, yakni berturut-turut sebesar 7.831.726,0 miliar rupiah (2011); 8.615.704,5 miliar rupiah (2012); 9.546.134,0 miliar rupiah (2013); 10.565.817,3 miliar rupiah (2014) dan 11.540.789,8 miliar rupiah (2015). Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga maupun volume. Peningkatan PDB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDB (*demand side*) yang akan diuraikan lebih lanjut dalam publikasi ini.

**Grafik 1. Produk Domestik Bruto Indonesia adh Berlaku Menurut
Komponen Pengeluaran Tahun 2011 - 2015**



Selain dinilai adh Berlaku, PDB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang divalusi dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan itu, maka PDB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDB komponen pengeluaran atas

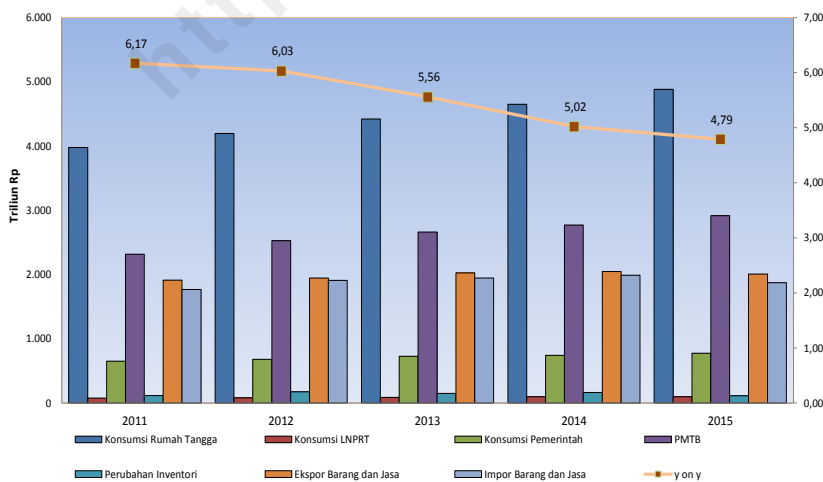
dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2011-2015, gambaran tentang nilai PDB adh Konstan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011 – 2015

		(Miliar Rp)				
Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1 Konsumsi Rumah Tangga	3.977.288,6	4.195.787,6	4.423.416,9	4.651.480,2	4.882.258,7	
2 Konsumsi LNPR	76.790,3	81.918,6	88.618,0	99.420,0	98.789,0	
3 Konsumsi Pemerintah	652.291,7	681.819,0	727.812,1	736.283,1	775.925,1	
4 PMTB	2.316.359,1	2.527.728,8	2.654.375,0	2.775.733,6	2.916.601,6	
5 Perubahan Inventori	118.207,3	174.183,1	124.453,6	156.720,3	112.847,9	
6 Ekspor Barang dan Jasa	1.914.267,9	1.945.063,7	2.026.113,7	2.046.296,2	2.005.945,0	
7 Impor Barang dan Jasa	1.768.821,9	1.910.299,5	1.945.867,3	1.988.537,2	1.872.353,5	
8 Total PDB	7.287.635,3	7.727.083,4	8.156.497,8	8.566.271,2	8.976.931,5	
Diskrepansi Statistik	1.252,2	30.882,1	57.575,9	88.875,0	56.917,6	

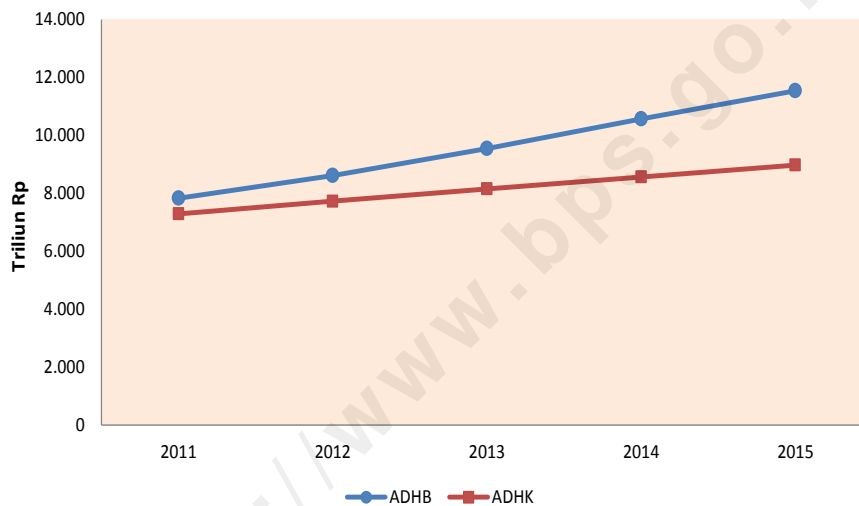
Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Grafik 2. Produk Domestik Bruto Indonesia adh Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011 – 2015



Dari tabel 2. nilai PDB adh Konstan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya yaitu masing-masing sebesar 7.287.635,3 miliar rupiah (2011); 7.727.083,4 miliar rupiah (2012); 8.156.497,8 miliar rupiah (2013); 8.566.271,2 miliar rupiah (2014) dan 8.976.931,5 miliar rupiah (2015). Sedangkan pada grafik 2. Terlihat selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi melambat dari 6,17 persen pada tahun 2011 menjadi 4,79 persen pada tahun 2015.

Grafik 3. Perbandingan Produk Domestik Bruto Indonesia adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2011 - 2015



Grafik di atas menunjukkan bahwa umumnya nilai PDB adh Berlaku selalu lebih tinggi dari nilai PDB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga yang cenderung selalu meningkat dalam perhitungan PDB adh Berlaku, sedangkan dalam PDB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Sama halnya dengan PDB adh Berlaku, sebagian besar komponen pengeluaran akhir PDB adh Konstan menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDB merupakan kontribusi dari seluruh komponen pengeluaran, yang terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT),

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor neto (E) atau Ekspor Barang dan Jasa minus Impor Barang dan Jasa. Terlihat bahwa selama periode 2011-2015, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Pengeluaran untuk pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 31 s.d 34 persen dan komponen ekspor barang dan jasa berperan sekitar 21 s.d 27 persen. Di sisi lain, impor barang dan jasa sebagai komponen pengurang pada PDB masih mempunyai peran yang relatif besar, yaitu sekitar 20 s.d 25 persen yang artinya sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk dari impor.

**Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Adh Berlaku Menurut
Komponen Pengeluaran Tahun 2011 – 2015**

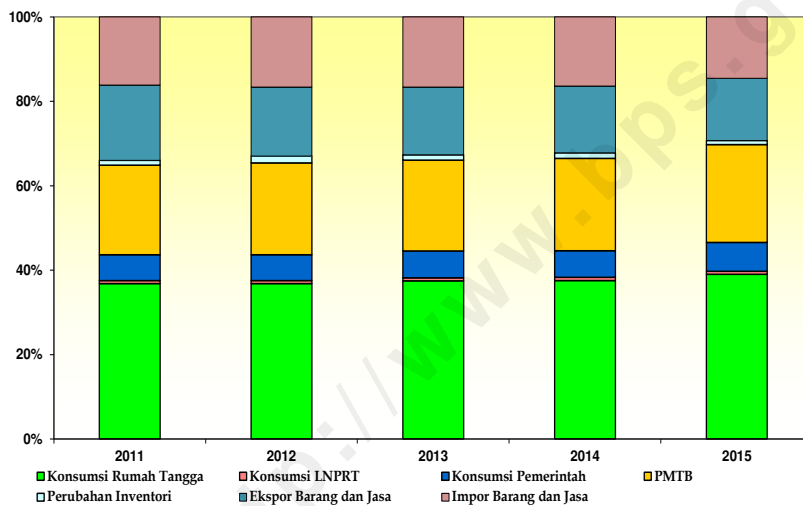
Uraian (1)	(Persen)				
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 * (5)	2015 ** (6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	54,40	55,35	55,74	55,99	55,92
2 Konsumsi LNPRT	1,03	1,04	1,09	1,18	1,13
3 Konsumsi Pemerintah	9,06	9,25	9,52	9,43	9,75
4 PMTB	31,31	32,72	31,97	32,58	33,19
5 Perubahan Inventori	1,68	2,35	1,87	1,99	1,38
6 Ekspor Barang dan Jasa	26,33	24,59	23,92	23,63	21,09
7 Impor Barang dan Jasa	23,85	24,99	24,71	24,42	20,85
8 Total PDB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Diskrepansi Statistik	0,06	-0,32	0,61	-0,37	-0,61

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 9,06 – 9,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2011 dan 2015 perdagangan internasional Indonesia

yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor barang dan jasa, menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dan jasa cenderung lebih tinggi dari nilai impor barang dan jasa. Kecenderungan perdagangan internasional Indonesia dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi surplus. Sedangkan pada tahun 2012-2014 perdagangan internasional Indonesia menunjukkan nilai ekspor barang dan jasa lebih rendah dari nilai impor barang dan jasa yang menunjukkan dalam kondisi defisit.

**Grafik 4. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia adh Berlaku Menurut
Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2015**



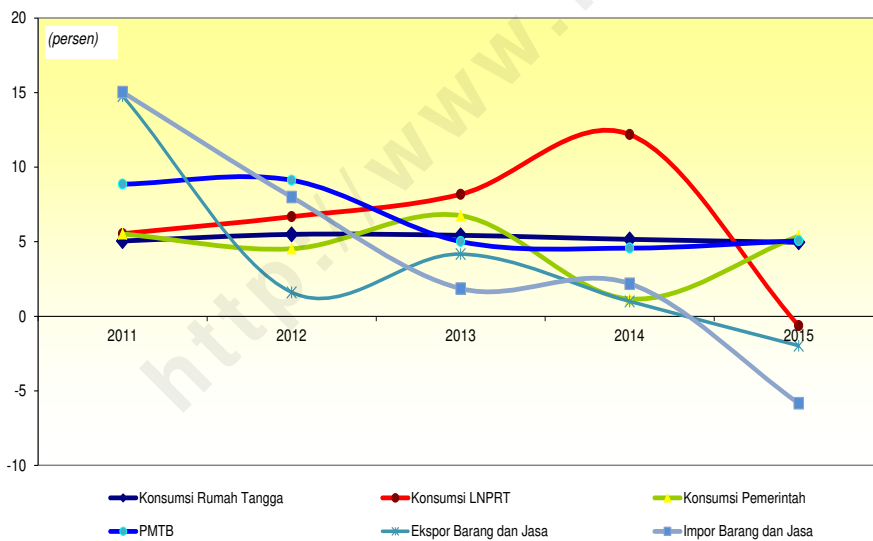
Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDB adalah pertumbuhan riil PDB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dari tahun 2011 s.d 2015 masing-masing sebesar 6,17 persen (2011); 6,03 persen (2012); 5,56 persen (2013); 5,02 persen (2014) dan 4,79 persen (2015).

**Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHK 2010 Menurut
Komponen Pengeluaran Tahun 2011 – 2015**

		(Persen)				
Uraian		2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	5,05	5,49	5,43	5,16	4,96
2	Konsumsi LNPRT	5,54	6,68	8,18	12,19	-0,63
3	Konsumsi Pemerintah	5,52	4,53	6,75	1,16	5,38
4	PMTB	8,86	9,13	5,01	4,57	5,07
5	Ekspor Barang dan Jasa	14,77	1,61	4,17	1,00	-1,97
6	Impor Barang dan Jasa	15,03	8,00	1,86	2,19	-5,84
Total PDB		6,17	6,03	5,56	5,02	4,79

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

**Grafik 5. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia adh Konstan 2010
Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011 - 2015**



Sementara itu, indeks implisit⁵ PDB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT,

⁵ Indeks perkembangan

dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Kumulatif kenaikan harga PDB yang terjadi sepanjang tahun 2010 - 2014 adalah sebesar 28,56 persen.

**Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut
Komponen Pengeluaran Tahun 2010 – 2015**

(Persen)

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	107,11	113,66	121,05	127,15	132,18
2 Konsumsi LNPRT	104,87	109,36	117,28	124,96	132,54
3 Konsumsi Pemerintah	108,76	116,87	124,13	135,23	145,06
4 PMTB	105,85	111,52	114,97	123,93	131,32
5 Ekspor Barang dan Jasa	107,71	108,94	112,72	122,20	121,35
6 Impor Barang dan Jasa	105,61	112,70	121,24	129,77	128,49
Total PDB	107,47	111,50	116,75	123,05	128,56

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

BAB III

PERKEMBANGAN MASING-MASING KOMPONEN PDB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2011 - 2015

Perubahan struktur ekonomi Indonesia akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2011 s.d 2015, tidak terlepas dari perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, konsumsi LNPR dan konsumsi pemerintah, kemudian sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu diuraikan pada bagian berikut.

3.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga merupakan porsi terbesar dalam pengeluaran akhir berbagai barang dan jasa, baik yang berasal dari domestik maupun impor. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah (PDB) yang diciptakan, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, dengan kata lain bahwa sebagian besar dari produk domestik yang dihasilkan di Indonesia dan produk impor yang didatangkan dari luar negeri akan digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Fungsi rumah tangga yang utama adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) dari barang dan jasa yang tersedia, termasuk pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga dikelompokkan berdasarkan 12 (dua belas) kelompok COICOP (*Classification of*

Individual Consumption by Purpose) yang pada publikasi ini disajikan menjadi 7 kelompok yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel; serta lainnya.

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011 – 2015 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.260.075,5	4.768.745,1	5.321.087,6	5.915.741,7	6.453.205,5
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.977.288,6	4.195.787,6	4.423.416,9	4.651.480,2	4.882.258,7
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	54,40	55,35	55,74	55,99	55,92
Rata-rata konsumsi per-RT per-tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	69.400,9	76.595,4	84.295,8	92.464,5	98.389,4
b. ADHK 2010	64.794,0	67.392,6	70.075,1	72.703,8	74.437,8
Rata-rata konsumsi per kapita Per tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	17.604,3	19.430,6	21.385,5	23.459,8	25.260,9
b. ADHK 2010	16.435,7	17.096,0	17.777,7	18.446,2	19.111,5
Pertumbuhan ⁶					
a. Total konsumsi RT	5,05	5,49	5,43	5,16	4,96
b. Per-RT	3,48	4,01	3,98	3,75	2,39
c. Per kapita	3,54	4,02	3,99	3,76	3,61
Jumlah RT (unit)	61.383.620	62.258.871	63.123.963	63.978.502	65.588.431
Jumlah penduduk (000 org)	241.991	245.425	248.818	252.165	255.462

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga konstan/ADHK2010)

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada periode tahun 2011 s.d 2015 cukup fluktuatif, mulai dari 54,40 persen (2011); 55,35 persen (2012); 55,74 persen (2013); 55,99 persen (2014) dan 55,92 persen (2015). Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 55,99 persen dan titik terendah pada tahun 2012 yaitu 54,35 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Pada tahun 2011, secara umum setiap rumah tangga di Indonesia menghabiskan dana sekitar 69.400,9 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi makanan dan minuman, selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 76.595,4 ribu rupiah (2012); 84.295,8 ribu rupiah (2013); 92.464,5 ribu rupiah (2014) dan 98.389,4 ribu rupiah (2015). Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan (2010)* rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 3 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 4,01 persen.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Indonesia meningkat, baik secara kuantitas (*volume*)

maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” berkisar antara 3,54 s.d 4,02 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 5,05 persen pada tahun 2011. Kemudian, berturut-turut sebesar 5,49 persen (2012); 5,43 persen (2013); 5,16 persen (2014) dan 4,96 persen (2015). Sementara itu konsumsi per kapita meningkat dari 3,54 persen (2011) menjadi 4,02 persen (2012). Namun pada tahun berikutnya melambat menjadi 3,99 persen (2013); 3,76 persen (2014) dan 3,61 persen (2015). Terlihat bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 1,50 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perbaikan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDB ini.

Secara rata-rata dari tahun 2011 s.d 2015, tampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Indonesia, bahwa konsumsi makanan dan minuman selain restoran lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga lainnya. Proporsi untuk makanan dan minuman selain restoran pada masing-masing tahun mencapai 38,47 persen (2011); 38,89 persen (2012); 38,52 persen (2013); 38,01 persen (2014) dan 38,20 persen (2015).

Struktur konsumsi rumah tangga yang memiliki proporsi tertinggi setelah kelompok makanan dan minuman selain restoran adalah kelompok transportasi dan komunikasi. Dari tabel di atas persentase kelompok transportasi dan komunikasi terhadap total konsumsi akhir rumah tangga pada tiap tahunnya adalah sebesar 23,32 persen (2011); 22,77 persen (2012); 23,43 persen (2013); 23,95 persen (2014) dan 23,38 persen (2015). Kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi yaitu pada kisaran 13 persen, sedangkan kelompok pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, kelompok kesehatan dan pendidikan,

kelompok restoran dan hotel serta kelompok lainnya memiliki proporsi yang relatif kecil terhadap total konsumsi rumah tangga.

**Tabel 7. Struktur dan Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir Rumah Tangga⁷					
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran (<i>Miliar Rp</i>)	1.638.643,5	1.854.628,9	2.049.781,9	2.248.518,8	2.465.290,3
(%)	38,47	38,89	38,52	38,01	38,20
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya (<i>Miliar Rp</i>)	175.860,1	187.041,1	203.088,5	222.284,3	238.872,3
(%)	4,13	3,92	3,82	3,76	3,70
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga (<i>Miliar Rp</i>)	569.628,5	637.059,9	705.521,6	780.828,3	867.560,9
(%)	13,37	13,36	13,26	13,20	13,44
d. Kesehatan dan Pendidikan (<i>Miliar Rp</i>)	290.849,9	327.738,0	359.752,4	395.784,7	437.590,4
(%)	6,83	6,87	6,76	6,69	6,78
e. Transportasi dan Komunikasi (<i>Miliar Rp</i>)	993.368,7	1.085.926,2	1.246.466,6	1.416.823,3	1.508.565,7
(%)	23,32	22,77	23,43	23,95	23,38
f. Restoran dan Hotel (<i>Miliar Rp</i>)	385.156,1	443.099,7	499.345,5	565.280,5	617.173,4
(%)	9,04	9,29	9,38	9,56	9,56
g. Lainnya (<i>Miliar Rp</i>)	206.568,8	233.251,3	257.131,1	286.221,7	318.152,6
(%)	4,85	4,89	4,83	4,84	4,93
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	4.260.075,5	4.768.745,1	5.321.087,6	5.915.741,7	6.453.205,5
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK)					
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2,19	3,77	4,35	4,42	5,47
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	5,27	6,48	5,28	4,53	3,69
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	5,20	5,87	5,81	4,55	4,83
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,31	5,83	5,72	6,16	6,16
e. Transportasi dan Komunikasi	6,57	6,76	6,60	5,80	4,61
f. Restoran dan Hotel	5,55	7,17	5,76	6,83	4,91
g. Lainnya	19,49	7,07	5,70	5,13	2,95
Total Konsumsi	5,05	5,49	5,43	5,16	4,96
Pertumbuhan implisit (indeks harga)⁸					
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	10,01	9,07	5,92	5,05	3,95
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	8,32	-0,12	3,13	4,71	3,64
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	4,87	5,64	4,67	5,86	5,99
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,19	6,47	3,83	3,63	4,14
e. Transportasi dan Komunikasi	4,16	2,40	7,67	7,44	1,78
f. Restoran dan Hotel	8,23	7,35	6,56	5,97	4,07
g. Lainnya	1,34	5,46	4,29	5,88	7,97
Total Konsumsi	7,11	6,11	5,84	5,72	3,93

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kelompok makanan dan minuman selain restoran menunjukkan fluktuasi, dengan

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga berlaku / ADHB)

⁸ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

masing-masing sebesar 2,19 persen (2011); 3,77 persen (2012); 4,35 persen (2013); 4,42 persen (2014) dan 5,47 persen (2015). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam perangkat data tersebut, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,11 persen, dimana harga kelompok makanan dan minuman selain restoran meningkat lebih tinggi dari kelompok yang lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya peningkatan harga relatif berfluktuasi pada masing-masing kelompok.

3.2. Konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga)

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga merupakan komponen baru pada series tahun dasar 2010. Pada publikasi sebelumnya konsumsi akhir LNPRT masuk dalam komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Akhir LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	80.529,9	89.585,8	103.929,0	124.242,0	130.936,0
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	76.790,3	81.918,6	88.618,0	99.420,3	98.789,0
Proporsi terhadap PDB (% ADHB)	1,03	1,04	1,09	1,18	1,13
Pertumbuhan Total Konsumsi Akhir LNPRT	5,54	6,68	8,18	12,19	-0,63

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan baik adh Berlaku maupun adh Konstan. Pada tahun 2011 konsumsi LNPRT sebesar 80.529,9 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu 89.585,8 miliar rupiah (2012), 103.929,0 miliar rupiah (2013), 124.242,0 miliar rupiah (2014) dan 130.936,0 miliar rupiah (2015). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT adh konstan tahun dasar 2010 terus mengalami peningkatan yaitu 5,54 persen (2011); 6,68 persen (2012); 8,18 persen (2013); dan 12,19 persen (2014). Sedangkan pada tahun 2015 tumbuh minus 0,63 persen.

3.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan / keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau

menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Pada tahun 2011 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sebesar 709.450,8 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya menjadi sebesar 796.848,3 miliar rupiah (2012); 908.574,3 miliar rupiah (2013); 996.197,4 miliar rupiah (2014) dan 1.125.542,4 miliar rupiah (2015). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah *adh Konstan* 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDB juga mengalami peningkatan, dari yang hanya 9,06 persen (tahun 2011) hingga mencapai 9,75 persen (tahun 2015). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 9,06 persen, sedangkan proporsi

tertinggi pada tahun 2015. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsumsi akhir pemerintah juga menjadi salah unsur pendorong dalam meningkatkan besaran nilai PDB.

**Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	709.450,8	796.848,3	908.574,3	996.197,4	1.125.542,4
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	652.291,7	681.819,0	727.812,1	736.283,1	775.925,1
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	9,06	9,25	9,52	9,43	9,75
Konsumsi Pemerintah per kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	2.931,7	3.246,8	3.651,6	3.950,6	4.405,9
b. ADHK 2010	2.695,5	2.778,1	2.925,1	2.919,8	3.037,3
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	155.213,1	178.346,3	208.254,6	223.598,1	246.914,8
b. ADHK 2010	142.707,9	152.601,1	166.822,1	165.259,9	170.217,8
Pertumbuhan ⁹					
a. Total konsumsi pemerintah	5,52	4,53	6,75	1,16	5,38
b. Konsumsi per kapita	4,00	3,06	5,29	-0,18	4,02
c. Konsumsi per-pegawai	6,15	6,93	9,32	-0,94	3,00
Jumlah Pegawai Pemerintah ¹⁰	4.570.818	4.467.982	4.362.805	4.455.303	4.558.425
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	241.991	245.425	248.818	252.165	255.462

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga konstan / ADHK 2010)
¹⁰ Tidak termasuk polisi dan militer

secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2011 konsumsi pemerintah per kapita adh Berlaku sebesar 2.931,7 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun selanjutnya, yaitu 3.246,8 ribu rupiah (2012); 3.651,6 ribu rupiah (2013); 3.950,6 ribu rupiah (2014) dan mencapai 4.405,9 ribu rupiah pada tahun 2015.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adh Konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 2.695,5 ribu rupiah (2011); 2.778,1 ribu rupiah (2012); 2.925,1 ribu rupiah (2013); 2.919,8 ribu rupiah (2014) dan 3.037,3 ribu rupiah (2015). Peningkatan konsumsi pemerintah per kapita adh Konstan ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,00 persen (2011) dan menurun menjadi 3,06 persen (2012). Pada tahun 2013 pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita tumbuh sebesar 5,29 persen, kemudian pada tahun 2014 tumbuh minus 0,18 persen dan tumbuh 4,02 persen (2015).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2011 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 155.213,1 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 178.346,3 ribu rupiah (2012); 208.254,6 ribu rupiah (2013); 223.598,1 ribu rupiah (2014) dan 246.914,8 ribu rupiah (2015). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,32 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010), diikuti juga jumlah pegawai pemerintah yang mengalami peningkatan. Pada periode tahun 2011 s.d 2015 jumlah pegawai pemerintah mengalami peningkatan dengan posisi pada masing-masing tahun sebesar 4.570.818 orang (2011), namun pada tahun 2012 dan 2013 jumlah pegawai mengalami penurunan yaitu 4.467.982 orang (2012) dan 4.362.805 orang (2013). Sedangkan tahun 2014 dan 2015 jumlah pegawai mengalami peningkatan menjadi 4.455.303 orang dan 4.558.425 orang.

**Tabel 10. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Indonesia
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah ¹¹					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	444.288,6	492.963,2	568.131,1	622.774,3	693.307,0
(%)	62,62	61,86	62,53	62,52	61,60
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	265.162,2	303.885,0	340.443,2	373.423,1	432.235,3
(%)	37,38	38,14	37,47	37,48	38,40
Total Konsumsi (Miliar Rp)	709.450,8	796.848,3	908.574,3	996.197,4	1.125.542,3
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	7,06	3,16	8,32	0,81	3,85
b. Konsumsi Individu	3,03	6,80	4,21	1,75	7,93
Total Konsumsi	5,52	4,53	6,75	1,16	5,38

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan 2013, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 5,52 persen dan 6,75 persen; untuk konsumsi per kapita 4,00 persen (2011) dan 5,29 persen (2013); sedangkan untuk

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu 6,93 persen dan 9,32 persen.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif, yaitu seluruh biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghasilkan barang dan jasa kolektif. Sekitar 60 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja rutin tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami penurunan dari sebesar 444.288,6 miliar rupiah (2011) menjadi 492.963,2 miliar rupiah (2012), 568.131,1 miliar rupiah (2013), 622.774,3 miliar rupiah (2014) dan 693.307,0 miliar rupiah (2015). Demikian pula dengan proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah. Pada tahun 2011 proporsinya mencapai 62,62 persen. Pada tahun 2012 turun menjadi 61,86 persen kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi 62,51 persen dan 62,69 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan mencapai 61,60 persen.

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan, dari 265.162,2 miliar rupiah tahun 2011 meningkat menjadi 303.885,0 miliar rupiah tahun 2012, 340.443,2 miliar rupiah pada tahun 2013, 373.423,1 miliar rupiah pada tahun 2014 dan 432.235,3 miliar rupiah pada tahun 2015. Secara umum proporsi belanja konsumsi individu cenderung meningkat, pada tahun 2011 sebesar 37,38 persen dan tahun 2012 sebesar 38,14 persen. Namun terjadi penurunan pada tahun berikutnya yaitu 37,47 persen pada tahun 2013 dan 37,48 persen pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 proporsi belanja konsumsi individu meningkat kembali menjadi 38,40 persen.

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan secara gradual dari yang sebesar 4.570.818 orang (2011) menjadi 4.558.425 orang (2015). Sedangkan jumlah penduduk meningkat

dari sejumlah 241.991 ribu orang pada tahun 2011 menjadi 255.462 ribu orang pada tahun 2015. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung meningkat dengan masing-masing adalah 52,94 (2011); 54,93 (2012); 57,03 (2013); 56,60 (2014) dan 56,04 (2015). Artinya jika pada tahun 2011 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 52 penduduk maka pada tahun 2012 menjadi sekitar 54 penduduk. Dan begitu pula pada tahun berikutnya satu pegawai pemerintah melayani sekitar 57 penduduk pada tahun 2013, 56 penduduk pada tahun 2014 dan juga 56 penduduk pada tahun 2015.

3.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasi menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 6 (enam) kelompok yaitu: Bangunan, Mesin dan Perlengkapan, Kendaraan, Peralatan lainnya, *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2011 - 2015 melambat dari 8,86 persen (2011) menjadi 4,57 persen (2014) kemudian tumbuh sebesar 5,07 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Bangunan, baik dalam bentuk bangunan

¹² Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

tempat tinggal (*residential building*) maupun bangunan bukan tempat tinggal (*non-residential building*) merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap yaitu mencapai di atas 70 persen dari total PMTB. Pertumbuhan di sektor bangunan cenderung satabil yaitu 6,01 persen (2011), 8,13 persen (2012), 6,74 persen (2013), 5,52 persen (2014), dan 6,23 persen (2015). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012.

**Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Indonesia Tahun 2011 – 2015**

U r a i a n	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	2.451.914,0	2.819.026,5	3.051.496,1	3.442.026,9	3.829.978,4
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2.316.359,1	2.527.728,8	2.654.375,0	2.775.733,6	2.916.601,6
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	31,31	32,72	31,97	32,58	33,19
Struktur PMTB ¹³					
a. Bangunan (<i>miliar Rp</i>)	1.791.932,4	2.053.896,4	2.242.779,8	2.569.122,4	2.886.077,8
(%)	73,08	72,86	73,50	74,64	75,35
b. Mesin dan Perlengkapan (<i>miliar Rp</i>)	280.002,3	329.147,2	343.132,0	350.148,5	367.612,0
(%)	11,42	11,68	11,24	10,17	9,60
c. Kendaraan (<i>miliar Rp</i>)	146.579,8	179.038,9	172.446,3	159.331,6	169.448,1
(%)	5,98	6,35	5,65	4,63	4,42
d. Peralatan Lainnya (<i>miliar Rp</i>)	35.531,1	38.480,5	41.709,1	48.785,8	58.543,9
(%)	1,45	1,37	1,37	1,42	1,53
e. CBR (<i>miliar Rp</i>)	145.934,1	159.227,3	177.279,5	204.747,1	231.496,9
(%)	5,95	5,65	5,81	5,95	6,04
f. Produk Kekayaan Intelektual (<i>miliar Rp</i>)	51.934,2	59.236,1	74.149,2	109.891,5	116.800,4
(%)	2,12	2,10	2,43	3,19	3,05
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	2.451.914,0	2.819.026,5	3.051.496,1	3.442.026,9	3.829.978,4
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁴ (%)					
a. Bangunan	6,01	8,13	6,74	5,52	6,23
b. Mesin dan Perlengkapan	24,07	12,16	0,37	(4,43)	(0,32)
c. Kendaraan	16,18	19,75	(5,64)	(8,43)	(0,57)
d. Peralatan Lainnya	11,66	4,54	4,36	7,53	10,47
e. CBR	11,10	5,13	1,58	9,17	4,78
f. Produk Kekayaan Intelektual	6,48	9,88	16,54	39,22	2,03
Total PMTB	8,86	9,13	5,01	4,57	5,07

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Proporsi terbesar ke dua setelah bangunan adalah investasi pada kelompok mesin dan perlengkapannya. Proporsi kelompok mesin dan perlengkapan terhadap total PMTB sebesar 11,42 persen (2011), 11,68 persen (2012), 11,24 persen (2013), 10,17 persen (2014), dan 9,60 persen (2015). Pertumbuhan kelompok barang modal mesin dan perlengkapan dalam negeri mencapai 24,07 persen pada tahun 2011 dan 12,16 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 barang modal mesin dan perlengkapan mengalami perlambatan hingga mencapai 0,37 persen. Bahkan pada tahun 2014 pertumbuhan barang modal mesin dan perlengkapan melambat cukup tajam menjadi sebesar minus 4,43 persen dan minus 0,32 persen pada tahun 2015.

Barang modal kendaraan mempunyai proporsi yang relatif stabil, proporsi setiap tahunnya yaitu 5,98 persen (2011); 6,35 persen (2012); 5,65 persen (2013); 4,63 persen (2014); dan 4,42 persen (2015). Sementara barang modal peralatan lain dalam kurun waktu tahun 2011-2015 memiliki kontribusi cukup kecil kurang dari 2 persen setiap tahunnya, masing-masing sebesar 1,45 persen (2011); 1,37 persen (2012); 1,37 persen (2013); 1,42 persen (2014) dan 1,53 persen (2015). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing kelompok barang modal. Pertumbuhan “riil” barang modal kendaraan pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 16,18 persen dan 19,75 persen. Namun pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan barang modal kendaraan mengalami perlambatan hingga mencapai minus 5,64 persen dan minus 8,43 persen kemudian tumbuh 0,57 persen (2015).

Pertumbuhan barang modal peralatan lainnya mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2011 sebesar 11,66 persen. Namun pada tahun 2012-2014 pertumbuhan barang modal peralatan lainnya mengalami penurunan sebesar 4,54 persen, 4,36 persen dan 7,53 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan barang modal mengalami peningkatan hingga mencapai 10,47 persen.

Dilihat dari struktur *Cultivated Biological Resources* (CBR) terhadap total PMTB, CBR memiliki kontribusi berkisar 5-6 persen yaitu sebesar 5,95 persen pada tahun 2011; 5,65 persen pada tahun 2012; 5,81 persen pada tahun 2013; 5,95 persen pada tahun 2014 dan 6,04 persen pada tahun 2015. Sedangkan Produk Kekayaan Intelektual memiliki kontribusi yang lebih kecil dibandingkan kontribusi CBR terhadap total PMTB, masing-masing sebesar 2,12 persen (2011); 2,10 persen (2012); 2,43 persen (2013); 3,19 persen (2014) dan 3,05 persen (2015). Jika dilihat pertumbuhannya, CBR cenderung mengalami perlambatan yaitu 11,10 persen pada tahun 2011 menjadi 4,78 persen pada tahun 2015. Produk kekayaan intelektual tumbuh cukup tinggi yaitu 6,48 persen pada tahun 2011 dan meningkat tajam di tahun 2014 yaitu 39,22 persen dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 16,54 persen, kemudian menjadi 2,03 persen pada tahun 2015.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2011-2015, pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi namun masih tumbuh positif. Pada tahun 2011 PMTB tumbuh sebesar 8,86 persen, kemudian meningkat menjadi 9,13 persen di tahun 2012. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012, meskipun melambat pada tahun berikutnya yaitu sebesar 5,01 persen pada tahun 2013; 4,57 persen pada tahun 2014 dan 5,07 persen pada tahun 2015.

3.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "**persediaan**" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Khusus di sektor perdagangan, inventori bisa berupa persediaan barang dagangan. Perubahan yang dimaksud, bisa dalam bentuk penambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Barang persediaan, bisa berupa produk jadi, produk setengah jadi, bahan baku, bahan

penolong maupun barang strategis pemerintah, yang belum terserap oleh pasar. Barang inventori di antaranya meliputi karet kering, biji sawit, coklat, kopi, teh, kulit kina, tembakau, rami, minyak mentah, kondensat, gas alam, elpiji, batu bara (andesit dan antrasit), aspal, bauksit, granit, emas dan sebagainya.

Dari sisi penghitungan, maka komponen Perubahan Inventori merupakan satu-satunya komponen yang hasilnya dapat berupa angka negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	131.328,6	202.638,4	178.090,5	210.407,1	158.753,9
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	118.207,3	174.183,1	124.453,6	156.720,3	112.847,9
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	1,68	2,35	1,87	1,99	1,38
Struktur Inventori ¹⁵					
Total inventori (%)					
- Hasil Perkebunan	1,55	1,88	1,49	8,20	2,31
- Hasil Pertambangan	10,63	2,57	4,36	27,37	7,19
- Hasil Industri	71,57	95,16	143,09	44,14	50,95
- Lainnya	16,24	0,39	-48,94	20,29	39,55

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Go Public Tahun 2015

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHB)

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya. Hal pokok yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi dalam PDB yang mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2011 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 131.328,6 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2012 sebesar 202.638,4 miliar rupiah. Pada tahun 2013 perubahan inventori sempat mengalami penurunan mencapai 178.090,5 miliar rupiah, namun pada tahun 2014 meningkat kembali mencapai 210.407,1 miliar rupiah. Kemudian mengalami penurunan kembali mencapai 158.753,9 miliar rupiah pada tahun 2015. Dilihat dari struktur perubahan inventori, hasil industri memiliki proporsi terbesar di setiap tahunnya yaitu 71,57 persen (2011); 95,16 persen (2012); 143,09 persen (2013); 44,14 persen (2014) dan 50,95 persen (2015).

3.5. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, karena dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekspor mencakup pembelian barang dan jasa oleh penduduk negara lain/luar negeri (non residen) atas produk ekonomi domestik, yang secara umum mencakup perdagangan barang, angkutan dan komunikasi, serta asuransi. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, dalam kurun waktu 2011-2015 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2.061.886,2 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 2.434.180,6 miliar rupiah pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2012-2014 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2.118.979,0 miliar rupiah; 2.283.776,7 miliar rupiah dan 2.497.116,4 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa adh Konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 1.914.267,9 miliar rupiah (2011); 1.945.063,7 miliar rupiah (2012); 2.026.113,7 miliar rupiah (2013); 2.046.296,2 miliar rupiah (2014) dan 2.005.945,0 miliar rupiah (2015). Pada periode 2011 s.d 2015, meskipun secara nominal nilai ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, tetapi sebaliknya proporsi dalam PDB justru cenderung menurun dari 26,33 persen pada tahun 2011 menjadi 21,09 persen di tahun 2015.

**Tabel 13. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.061.886,2	2.118.979,0	2.283.776,7	2.497.116,4	2.434.180,6
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.914.267,9	1.945.063,7	2.026.113,7	2.046.296,2	2.005.945,9
Proporsi terhadap PDB					
(% - ADHB)	26,33	24,59	23,92	23,63	21,09
Struktur Ekspor Barang dan Jasa ¹⁶					
a. Barang	1.890.412,3	1.918.040,0	2.044.358,1	2.223.342,0	2.130.949,6
(%)	91,68	90,52	89,52	89,04	87,54
a.1. Barang Non-migas	1.528.931,6	1.572.451,0	1.703.498,9	1.869.262,2	1.884.600,9
(%)	80,88	81,98	83,33	84,07	88,44
a.b. Barang migas	361.480,7	345.589,0	340.859,2	354.079,8	246.348,7
(%)	19,12	18,02	16,67	15,93	11,56
b. Jasa	171.473,9	200.939,0	239.418,5	273.774,4	303.231,0
(%)	8,32	9,48	10,48	10,96	12,46
Total ekspor	2.061.886,2	2.118.979,0	2.283.776,7	2.497.116,4	2.434.180,6
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁷					
a. Barang	14,89	0,82	3,81	0,80	(2,27)
a.1. Barang Non-migas	13,83	2,56	7,14	1,46	(4,10)
a.b. Barang migas	20,20	(7,42)	(13,64)	(3,50)	10,25
b. Jasa	13,54	9,81	7,57	2,83	0,69
Total ekspor	14,77	1,61	4,17	1,00	(1,97)

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Menurut komposisi ekspor dalam bentuk barang atau jasa, maka sebagian besar ekspor Indonesia berupa barang, sementara nilai ekspor dalam bentuk jasa memiliki peran yang tidak terlalu besar. Ekspor barang memiliki proporsi di masing-masing tahun sebesar 91,68 persen (2011); 90,52 persen (2012); 89,52 persen (2013); 89,04 persen (2014) dan 87,54 persen (2015). Sedangkan ekspor jasa memiliki peranan terendah terhadap total ekspor barang dan jasa, masing-masing tahun sebesar 8,32 persen (2011); 9,48 persen (2012); 10,48 persen (2013); 10,96 persen (2014) dan 12,46 persen (2015).

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang sangat tinggi, khususnya pada tahun 2011 mencapai 14,77 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan

¹⁶ Diturunkan dari PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

¹⁷ Diturunkan dari perhitungan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010)

adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang non migas. Namun pada tahun 2012 pertumbuhan total ekspor barang dan jasa mengalami perlambatan menjadi 1,61 persen dikarenakan peningkatan ekspor barang dan jasa tidak setinggi peningkatan yang terjadi di tahun sebelumnya. Tahun 2013 ekspor barang dan jasa mulai membaik yaitu tumbuh sebesar 4,17 persen. Pada tahun 2014 terkoreksi menjadi tumbuh melambat sebesar 1,02 persen di tahun 2014 dan tumbuh minus 1,97 persen pada tahun 2015.

3.6. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor barang dan jasa, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. Oleh karena itu untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan, yaitu dengan cara mengurangi nilai PDB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDB menurut lapangan usaha.

Berbeda dengan komponen ekspor barang dan jasa, transaksi impor barang dan jasa menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Karena impor bukan merupakan produk yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi domestik Indonesia, oleh karenanya impor harus dikeluarkan dari penghitungan PDB. Dengan demikian, maka PDB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain (*rest of the world*). Selain dibedakan menurut barang dan jasa, pada tingkat yang agak rinci, impor barang dibedakan menurut 2 kategori yaitu : barang non migas dan barang

migas. Pada komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Indonesia meningkat (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010) pada kurun tahun 2011 s.d 2014 sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan. Pada tahun 2011 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai, 1.868.075,0 miliar rupiah, kemudian meningkat sebesar 2.152.937,0 miliar rupiah pada tahun 2012, 2.359.212,0 miliar rupiah pada tahun 2013, 2.580.527,0 miliar rupiah pada tahun 2014 dan terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 2.405.762,4 miliar. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2011 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 23,85 persen. Namun pada tahun 2012 kontribusi impor barang dan jasa meningkat menjadi 24,99 persen. Selanjutnya, pada tahun 2013-2015 proporsi impor barang dan jasa menurun yaitu sebesar 24,71 persen, 24,42 persen dan 20,85 persen.

Di sisi lain, secara riil nilai impor barang dan jasa mengalami peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2011 sebesar 15,03 persen. Pada tahun 2012 impor barang dan jasa tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 8,00 persen, 1,86 persen pada tahun 2013, 2,19 persen pada tahun 2014 dan perlambatan cukup tajam terjadi pada tahun 2015 menjadi sebesar minus 5,84 persen pada tahun 2015.

**Tabel 14. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor Barang dan Jasa					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.868.075,0	2.152.937,0	2.359.212,1	2.580.527,1	2.405.762,4
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.768.821,9	1.910.299,5	1.945.867,3	1.988.537,2	1.872.353,5
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	23,85	24,99	24,71	24,42	20,85
Struktur Impor ¹⁸					
a. Barang	1.596.455,7	1.850.040,0	2.012.939,9	2.177.253,0	1.969.371,0
(%)	85,46	85,93	85,32	84,37	81,86
a.1. Barang Non-migas	1.230.537,7	1.439.293,0	1.523.386,0	1.652.354,3	1.635.191,4
(%)	65,87	66,85	64,57	64,03	67,97
a.2. Barang migas	365.918,0	410.747,0	489.553,9	524.898,7	334.179,6
(%)	19,59	19,08	20,75	20,34	13,89
b. Jasa	271.619,3	302.897,0	346.272,2	403.277,1	436.391,4
(%)	14,54	14,07	14,68	15,63	18,14
Total ekspor	1.868.075,0	2.152.937,0	2.359.212,1	2.580.527,1	2.405.762,4
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁹					
a. Barang	16,80	9,10	2,03	2,40	(6,12)
a.1. Barang Non-migas	17,77	10,20	0,90	3,01	(7,11)
a.b. Barang migas	12,97	4,57	6,90	(0,08)	(1,90)
b. Jasa	6,19	1,96	0,90	0,95	(4,20)
Total ekspor	15,03	8,00	1,86	2,19	(5,84)

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Menurut komposisi impor dalam bentuk barang atau jasa, maka sebagian besar produk impor berbentuk barang non migas yang memiliki porsi rata-rata sekitar 67,97 persen, diikuti impor jasa sekitar 18,14 persen dan impor barang migas 13,89 persen. Secara struktur Impor dalam bentuk barang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011 s.d 2015, di mana pada tahun 2011 sebesar 85,46 persen, 85,93 persen pada tahun 2012, 85,32 persen pada tahun 2013, 84,37 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 sebesar 81,86 persen. Sedangkan Impor jasa mempunyai pola struktur yang cenderung mengalami peningkatan di mana pada tahun 2011 porsi impor jasa sebesar 14,54 persen, 14,07 persen pada tahun 2012, 14,68 persen pada tahun 2013, 15,63 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 sebesar 18,14 persen.

¹⁸ Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHB)

¹⁹ Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHK 2010)

<http://www.bps.go.id>

BAB IV

BEBERAPA AGREGAT PDB DAN PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 2011 - 2015

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDB. Meskipun secara total mempunyai nilai yang sama, namun PDB yang diukur melalui pendekatan lapangan usaha atau pengeluaran mempunyai dua dimensi analisis yang berbeda. Secara garis besar, paling tidak dua dimensi itu mampu untuk menggambarkan tentang bagaimana nilai tambah produk diciptakan dan siapa pengguna akhir produk tersebut. Dalam publikasi ini, beberapa rasio (perbandingan relatif) juga akan disajikan guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

Dalam menghasilkan berbagai produk barang dan jasa, maka di satu sisi akan menciptakan nilai tambah, sementara di sisi lain nilai tambah tersebut akan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah rumah tangga, LNPRT, perusahaan, dan pemerintah. Berdasarkan proses pembentukan dan pemanfaatan nilai tambah ini, dapat dipelajari lebih jauh tentang sumber-sumber pendapatan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diperhitungkan besaran pendapatan potensial yang akan diterima oleh masyarakat atau yang disebut sebagai **Pendapatan Nasional**.

4.1 PDB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan (konsep bruto). PDB dapat digunakan sebagai **ukuran produktivitas**, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung

melalui pendekatan nilai tambah. Proses tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan dukungan berbagai faktor produksi serta sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian, maka nilai tambah yang sebagian besar menggambarkan balas jasa (kompensasi atas) faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal (kapital) dan keahlian (kewirausahaan), merupakan inti dari analisis PDB di sini. Di sisi yang lain, PDB menurut pengeluaran atau permintaan akhir menjelaskan tentang aspek konsumsi dan akumulasi, bukan aspek produksi.

Dari series data PDB pengeluaran akan diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDB perkapita, yang selama ini digunakan sebagai proksi dari pola dan perkembangan **distribusi pendapatan** di dalam masyarakat.

**Tabel 15. Produk Domestik Bruto dan PDB Perkapita
Tahun 2011 - 2015**

U r a i a n	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	7.831.726,0	8.615.704,5	9.546.134,0	10.565.817,3	11.540.789,8
- ADHK 2010	7.287.635,3	7.727.083,4	8.156.497,8	8.566.271,2	8.976.931,5
PDB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	32.363,7	35.105,2	38.365,9	41.900,4	45.176,2
- ADHK 2010	30.115,3	31.484,5	32.781,0	33.970,9	35.140,0
Perkembangan					
PDB perkapita ADHB	14,10	10,01	10,80	10,68	9,23
Pertumbuhan					
PDB perkapita ADHK 2010	6,17	6,03	5,56	5,02	4,79
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	241.991	245.425	248.818	252.165	255.462

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

PDB per-kapita Indonesia menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perbandingan kenaikan PDB dan jumlah penduduk. PDB per-kapita atas dasar harga berlaku (*current price*), secara kumulatif meningkat mulai tahun 2011, dari sebesar 32.363,7 ribu rupiah menjadi 45.176,2 ribu rupiah di tahun 2015. Di mana pada periode tahun 2012 s.d 2014 masing masing tahun meningkat menjadi 35.105,2 ribu rupiah, 38.365,9 ribu rupiah dan 41.900,4 ribu rupiah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDB atau nilai tambah sebesar nilai dimaksud pada masing-masing tahun.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara riil melambat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan PDB per-kapita ini berawal dengan besaran 6,17 persen (2011) menjadi 6,03 persen (2012), 5,56 persen (2013), 5,02 persen (2014) dan 4,79 persen (2015). Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,38 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut, tidak saja terjadi secara riil tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel

Pendapatan Nasional menggambarkan tentang pendapatan potensial yang diterima oleh seluruh masyarakat sesuai sumber-nya, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kenyataannya pendapatan yang dihasilkan di satu wilayah belum tentu sepenuhnya diterima, digunakan atau dinikmati oleh masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut, karena kemungkinan ada sebagian yang mengalir ke luar wilayah/negara. Sebaliknya, ada pula pendapatan yang masuk ke wilayah tersebut dari wilayah lain. Oleh karena itu konsep Pendapatan Nasional menjelaskan tentang pendapatan yang diterima oleh masyarakat (residen) dari seluruh balas jasa faktor

produksi yang diterima, baik yang berasal dari aktivitas ekonomi domestik maupun dari luar negeri dikurangi oleh pembayaran atas pendapatan masyarakat non residen..

Pendapatan Nasional yang merupakan refleksi ukuran kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat, menggambarkan berbagai hal yang dicapai secara nasional yang dinyatakan dalam satuan moneter, pada kurun waktu tertentu (*current condition*). Ukuran keberhasilan tersebut digambarkan melalui kemampuan dalam menghasilkan berbagai produk atau barang dan jasa, menciptakan pendapatan, mengkonsumsi, serta menambah aset yang dimiliki oleh masyarakat pada kurun waktu tertentu. Karena sistem ekonomi negara bersifat terbuka, maka terjadi interaksi dan transaksi dengan luar negeri, yang menyebabkan terjadi aliran pendapatan masuk maupun keluar (*factorial income, net*).

Pendapatan Nasional diperoleh dari PDB ditambah dengan selisih antara pendapatan faktor produksi yang diterima dari dan yang dibayarkan ke luar negeri. Pendapatan faktor produksi ini merupakan perolehan pendapatan atau pembayaran yang diwujudkan dalam bentuk balas jasa faktor produksi tenaga kerja (seperti upah dan gaji) dan bukan tenaga kerja (bunga, deviden, royalti, serta kompensasi atas pemilikan faktor produksi lainnya). Pendapatan tersebut merupakan sumber pembiayaan hidup (konsumsi) masyarakat. Apabila produk ekonomi yang dihasilkan tersebut dikaitkan dengan pola dan perilaku konsumsi masyarakat, maka angka pendapatan nasional dapat digunakan sebagai proksi atas ukuran kemakmuran.

Langkah menghitung Pendapatan Nasional²³ adalah dengan mengurangi PDB (nilai tambah bruto)²⁴ dengan penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Nilai PDB dikurangi penyusutan disebut sebagai PDN (Produk Domestik Neto), kemudian apabila dikurangi dengan pajak tidak langsung (neto) disebut sebagai PDN atas dasar biaya faktor (*at factor cost*). Dengan demikian maka Produk Domestik Neto (PDN) atas dasar

23 Mengacu pada konsep SNA

24 Atas dasar harga pasar

biaya faktor ini identik dengan balas jasa faktor produksi yang diciptakan di dalam wilayah ekonomi domestik (pendapatan domestik). Parameter itu bila diperhitungkan dengan pendapatan faktor yang diterima, dan dikurangi dengan yang dibayarkan ke luar negeri akan sama dengan **Pendapatan Nasional**.

Dalam kenyataan, Pendapatan Nasional belum bisa menggambarkan pendapatan potensial yang dapat diterima oleh masyarakat, masih ada penggunaan lain yang harus diperhitungkan, yaitu transfer berjalan (*current transfer*). Pendapatan Nasional ditambah dengan transfer berjalan (neto) akan sama dengan **Pendapatan Disposabel** (*disposable income*). Untuk itu, Pendapatan Disposabel menggambarkan maksimum pendapatan yang tersedia, yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membiayai konsumsi, atau untuk meningkatkan kekayaannya.

Dilihat secara umum, selama ini pendapatan nasional nilainya selalu lebih kecil dari nilai nominal PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena dideduksi oleh pajak tidak langsung (neto) dan penyusutan, pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri jauh lebih kecil dari pada yang dibayarkan ke luar negeri, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan ekonomi domestik. Mengalirnya pendapatan faktor produksi ke luar negeri disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh negara lain. Namun apabila diperhitungkan transfer maka penerimaan transfer Indonesia selalu dalam kondisi positif, dalam arti transfer yang diterima dari luar negeri lebih tinggi dari pada yang dibayarkan ke luar negeri. Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel ini merupakan ukuran yang bersifat universal, dan digunakan sebagai indikator perbandingan kemakmuran antar negara.

PDB adh Berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, diawali dengan nilai sebesar 7.831.726,0 miliar rupiah (2011) menjadi 8.615.704,5 miliar rupiah (2012),

9.546.134,0 miliar rupiah (2013), 10.565.817,3 miliar rupiah (2014) dan mencapai 11.540.789,8 miliar rupiah pada tahun 2015.

**Tabel 16. PDB, Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Nasional
Perkapita Tahun 2011 – 2015**

U r a i a n	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB (ADHB) (Miliar Rp)	7.831.726,0	8.615.704,5	9.546.134,0	10.565.817,3	11.540.789,8
<i>Minus :</i>					
Penyusutan	1.429.983,8	1.603.812,4	1.766.892,0	1.970.519,4	2.129.438,2
<i>Minus :</i>					
Pajak tidak langsung (neto) ²⁵	217.675,6	258.303,8	305.357,3	332.860,6	594.970,8
<i>Plus :</i>					
Pendapatan atas faktor produksi dari LN (neto) ²⁶	-216.892,7	-243.193,0	-285.326,2	-354.474,2	-386.257,9
Pendapatan Nasional (miliar rupiah)	5.967.173,9	6.510.395,3	7.188.558,5	7.907.963,2	8.430.122,9
<i>Plus</i>					
Penerimaan Transfer ²⁷ dari LN (neto) ²⁸	36.623,5	38.311,4	43.581,6	61.799,3	73.292,6
Pendapatan Disposabel Nasional (Miliar Rp)	6.003.797,4	6.548.706,7	7.232.140,1	7.969.762,5	8.503.415,5
<i>Perkapita (ribu rupiah)</i>					
- PDB	32.363,7	35.105,2	38.365,9	41.900,4	45.176,2
- Pendapatan Nasional	24.658,7	26.527,0	28.890,8	31.360,3	32.999,5
- Pendapatan Disposabel	24.810,0	26.683,1	29.066,0	31.605,4	33.286,4
Kurs 1 US \$ = Rp	8.697,1	9.357,9	10.431,2	11.839,0	13.377,0
<i>Perkapita (US \$)</i>					
- PDB	3.721,2	3.751,4	3.678,0	3.539,2	3.377,2
- Pendapatan Nasional	2.835,3	2.834,7	2.769,7	2.648,9	2.466,9
- Pendapatan Disposabel	2.852,7	2.851,4	2.786,4	2.669,6	2.488,3
Jumlah penduduk (000 org) ²⁹	241.991	245.425	248.818	252.165	255.462

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Nilai penyusutan juga cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembentukan modal pada berbagai lapangan usaha, masing-masing dengan nilai 1.429.983,8 miliar rupiah (2011), 1.603.812,4 miliar rupiah (2012), 1.766.892,0 miliar

²⁵ Pajak tidak langsung minus subsidi

²⁶ Yang diterima dikurangi yang dibayarkan

²⁷ Transfer berjalan (current transfer)

²⁸ Yang diterima dikurangi yang dibayarkan

²⁹ Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 (Pertengahan tahun/Juni)

rupiah (2013), 1.970.519,4 miliar rupiah (2014) dan 2.129.438,2 miliar rupiah (2015). Demikian juga dengan pajak tidak langsung neto atau pajak yang dibayar dikurangi subsidi yang diterima oleh masyarakat dalam beberapa tahun meningkat. Pada tahun 2011 pajak tidak langsung neto sebesar 217.675,6 miliar rupiah meningkat menjadi 258.303,8 miliar rupiah di tahun 2012. Demikian pula pada tahun-tahun berikutnya pajak tak langsung neto mengalami peningkatan menjadi 305.357,3 miliar rupiah (2013), 332.860,6 miliar rupiah (2014) dan 594.970,8 miliar rupiah (2015).

Nilai **Pendapatan Nasional** pada masing-masing tahun sebesar 5.967.173,9 miliar rupiah pada tahun 2011, 6.510.395,3 miliar rupiah pada tahun 2012, 7.188.558,5 miliar rupiah pada tahun 2013, 7.907.963,2 miliar rupiah pada tahun 2014 dan mencapai 8.430.122,9 miliar rupiah pada tahun 2015. Pendapatan nasional itu, apabila dikoreksi dengan penerimaan transfer dari luar negeri akan diperoleh Pendapatan Disposabel Nasional. Karena transfer yang diterima dari luar negeri selalu lebih besar dari transfer yang dibayarkan ke luar negeri (dengan posisi selalu positif atau bertambah), maka menyebabkan adanya aliran devisa masuk dari transaksi tersebut. Penerimaan transfer dari luar negeri pada tahun 2011 sebesar 36.623,5 miliar rupiah meningkat menjadi 38.311,4 miliar rupiah pada tahun 2012, 43.581,6 miliar rupiah pada tahun 2013, 61.799,3 miliar rupiah pada tahun 2014 dan 73.292,6 miliar rupiah.

Pendapatan Disposabel (Nasional) yang secara umum nilainya di atas Pendapatan Nasional, juga cenderung semakin meningkat dengan besaran masing-masing tahun adalah 6.003.797,4 miliar rupiah pada tahun 2011, 6.548.706,7 miliar rupiah pada tahun 2012, 7.232.140,1 miliar rupiah pada tahun 2013, 7.969.762,5 miliar rupiah pada tahun 2014 dan 8.503.415,5 miliar rupiah pada tahun 2015. Ukuran per-kapita, baik yang menyangkut PDB per-kapita, Pendapatan Nasional per-kapita serta Pendapatan Disposabel per-kapita yang dinyatakan dalam satu satuan rupiah menunjukkan

peningkatan. Dalam rupiah, perkembangan rata-rata PDB per-kapita, Pendapatan Nasional per-kapita serta Pendapatan Disposabel per-kapita setiap tahun juga menunjukkan peningkatan secara optimal. Dilihat dari titik penghujung tahun (2011 dan 2015), PDB per-kapita meningkat dari sebesar 32.363,7 ribu rupiah (2011) menjadi 45.176,2 ribu rupiah (2014). Kemudian Pendapatan Nasional per-kapita dari sebesar 24.658,7 ribu rupiah (2011) meningkat menjadi sebesar 32.999,5 ribu rupiah (2015). Sedangkan pendapatan disposabel per-kapita juga meningkat dari 24.810,0 ribu rupiah (2011) menjadi 33.286,4 ribu rupiah (2015).

Rata-rata perkapita dalam US\$ cenderung menurun, PDB per-kapita dari 3.721,2 US\$ pada tahun 2011 menjadi 3.377,2 US\$ pada tahun 2015, pendapatan nasional per-kapita dari 2.835,3 US\$ pada tahun 2011 menjadi 2.466,9 US\$ tahun 2015 dan pendapatan disposabel dari 2.852,7 US\$ pada tahun 2011 menjadi 2.488,3 US\$ di tahun 2015.

4.3. Kecenderungan Rata-rata untuk Mengonsumsi dan Menabung / *Average Propensity to Consume & Average Propensity to Save*

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*), yang dinyatakan dalam satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan. Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$APS = \frac{S}{Y_d} \qquad APC = \frac{C}{Y_d}$$

Di mana C = Tingkat Konsumsi, S = Tingkat Tabungan, dan Y_d = Pendapatan disposabel.

Perlu diketahui pula bahwa $APC + APS = 1$

**Tabel 17. Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Disposabel Nasional (Y_d) (Miliar Rp)	6.003.797,4	6.548.706,7	7.232.140,1	7.969.762,5	8.503.415,5
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	4.260.075,5	4.768.745,1	5.321.087,6	5.915.741,7	6.453.205,5
Total Konsumsi Pemerintah (ADHB) (Miliar Rp)	709.450,8	796.848,3	908.574,3	996.197,4	1.125.542,4
Total Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	4.969.526,3	5.565.593,3	6.229.661,9	6.911.939,1	7.578.747,9
APC	0,83	0,85	0,86	0,87	0,89
Tabungan (Miliar Rp)	1.034.271,1	983.113,4	1.002.478,2	1.057.823,4	924.667,6
APS	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Dari tabel di atas pada tahun 2011, didapat APC sebesar 0,83 dan APS sebesar 0,17 ini berarti bahwa rata-rata kecenderungan untuk mengkonsumsi adalah sebesar 83 persen dan rata-rata kecenderungan untuk menabung sebesar 17 persen. Begitu juga tahun-tahun selanjutnya yang masih memiliki pola yang sama, ini mengindikasikan bahwa rata-rata kecenderungan mengkonsumsi masih sangat tinggi dari rata-rata kecenderungan untuk menabung.

4.4. Perbandingan Penggunaan PDB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDB Indonesia (sekitar

60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDB Penggunaan untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2011 – 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	4.260.075,5	4.768.745,1	5.321.087,6	5.915.741,7	6.453.205,5
Total Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.061.886,2	2.118.979,0	2.283.776,7	2.497.116,4	2.434.180,6
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2,07	2,25	2,33	2,37	2,65

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2,07 kali dari yang diekspor di tahun 2011, di tahun-tahun berikutnya rasio masing-masing sebesar 2.25 kali pada tahun 2012; 2,33 kali pada tahun 2013; 2,37 kali pada tahun 2014 dan 2,65 kali pada tahun 2015. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor barang dan jasa meningkat selama rentang tahun 2011-2015, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.5 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	4.260.075,5	4.768.745,1	5.321.087,6	5.915.741,7	6.453.205,5
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	2.451.914,0	2.819.026,5	3.051.496,2	3.442.026,9	3.829.978,4
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,74	1,69	1,74	1,72	1,68

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung stabil, dari sebesar 1,74 pada tahun 2011 menjadi 1,68 pada tahun 2015. Pada tahun 2012 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 1,69 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 1,74. Sedangkan pada tahun 2014 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB menurun kembali menjadi 1,72. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB tahun 2012 merupakan rasio terendah selama 5 tahun terakhir karena pertumbuhan PMTB yang lebih cepat.

4.6. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga (termasuk

LNPRT) dan pemerintah, yang meskipun mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDB
Tahun 2011 – 2015**

U r a i a n	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	4.260.075,5	4.768.745,1	5.321.087,6	5.915.741,7	6.453.205,5
b. LNPRT	80.529,9	89.585,8	103.929,0	124.242,0	130.936,0
b. Pemerintah	709.450,8	796.848,3	908.574,3	996.197,4	1.125.542,4
J u m l a h	5.050.056,2	5.655.179,1	6.333.590,9	7.036.181,1	7.709.683,9
PDB (ADHB) (Miliar Rp)	7.831.726,0	8.615.704,5	9.546.134,0	10.565.817,3	11.540.789,8
Proporsi	64,48	65,64	66,35	66,59	66,80

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga, LNPRT dan pemerintah (lebih dari 60 persen). Seiring konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah makin meningkat setiap tahunnya, proporsi terhadap PDB semakin meningkat. Berturut-turut 64,48 persen (2011); 65,64 persen (2012); 66,35 persen (2013); 66,59 persen (2014) dan 66,80 persen (2015). Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor barang dan jasa) memiliki peran yang relatif kecil.

4.7 Perbandingan Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB

Ekspor Barang dan Jasa merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor pasti menggunakan kapital (PMTB), sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor barang dan jasa terhadap PMTB

dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor barang dan jasa dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 21. Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB (ADHB)
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.061.886,2	2.118.979,0	2.283.776,7	2.497.116,4	2.434.180,6
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	2.451.914,0	2.819.026,5	3.051.496,2	3.442.026,9	3.829.978,4
Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB	0,84	0,75	0,75	0,73	0,64

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Pada periode tahun 2011 s.d 2015, nilai ekspor barang dan jasa lebih rendah dari PMTB sebagaimana digambarkan di atas. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor barang dan jasa) disyaratkan tersedia sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Besaran rasio masing-masing tahun adalah sebagai berikut: 0,84 (2011); 0,75 (2012); 0,75 (2013); 0,73 (2014) dan 0,64 (2015).

4.8. Perbandingan PDB terhadap Impor Barang dan Jasa

Memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Besar kecilnya ketergantungan ditunjukkan melalui rasio, apabila rasionya kecil berarti ketergantungan semakin tinggi, sebaliknya apabila rasionya besar berarti ketergantungan terhadap produk impor tidak terlalu tinggi.

**Tabel 22. Rasio PDB terhadap Impor barang dan jasa
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB (ADHB) (Miliar Rp)	7.831.726,0	8.615.704,5	9.546.134,0	10.565.817,3	11.540.789,8
Total Impor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	1.868.075,0	2.152.937,0	2.359.212,1	2.580.527,1	2.405.762,4
Rasio PDB terhadap Impor Barang dan Jasa	4,19	4,00	4,05	4,09	4,80

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Rasio PDB terhadap impor barang dan jasa menunjukkan penurunan dari 4,19 di tahun 2011 menjadi 4,00 di tahun 2012. Namun kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu menjadi 4,05 di tahun 2013, 4,09 di tahun 2014 dan 4,80 di tahun 2015. Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2015 (4,80) lebih disebabkan penurunan impor barang dan jasa dibandingkan impor barang dan jasa tahun sebelumnya. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDB terhadap produk impor.

4.9. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Berdasarkan seri data yang ada dapat ditunjukkan bahwa selama ini ekonomi Indonesia masih selalu ditopang oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan ini dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*) yang selalu menunjukkan ketidakseimbangan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 **	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDB (ADHB)	7.831.726,0	8.615.704,5	9.546.134,0	10.565.817,3	11.540.789,8
(Miliar Rp)	(80,74)	(80,01)	(80,18)	(80,37)	(82,75)
Total nilai Impor ADHB	1.868.075,0	2.152.937,0	2.359.212,1	2.580.527,1	2.405.762,4
(Miliar Rp)	(19,26)	(19,99)	(19,82)	(19,63)	(17,25)
Total Permintaan Akhir ³⁰ (Miliar Rp)	9.699.801,0	10.768.641,5	11.905.346,1	13.146.344,4	13.946.552,2
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, dengan rentang 17 s.d 20 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 80 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat dari 9.699.801,0 miliar rupiah (2011) menjadi 10.768.641,5 miliar rupiah (2012). Tahun 2013 permintaan akhir masyarakat sudah mencapai nilai sebesar 11.905.346,1 miliar rupiah, tahun 2014 sebesar 13.146.344,4 miliar rupiah dan pada tahun 2015 mencapai 13.946.552,2 miliar rupiah.

Di sisi lain penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 7.831.726,0 miliar rupiah (2011); 8.615.704,5 miliar rupiah (2012); 9.546.134,0 miliar rupiah (2013); 10.565.817,3 miliar rupiah (2014) dan 11.540.789,8 miliar rupiah (2015). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 1.868.075,0 miliar rupiah (2011); 2.152.937,0 miliar rupiah (2012); 2.359.212,0 miliar rupiah (2013); 2.580.527,1 miliar rupiah dan 2.405.762,4 miliar rupiah (2015).

³⁰ Termasuk diskrepansi statistik

4.10. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai **Ekspor Neto**, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, sebaliknya apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor, maka yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara di antaranya juga ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Rasio di sini tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Tahun 2011 – 2015**

U r a i a n	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.061.886,2	2.118.979,0	2.283.776,7	2.497.116,4	2.434.180,6
Nilai Impor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	1.868.075,0	2.152.937,0	2.359.212,1	2.580.527,1	2.405.762,4
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	193.811,2	-33.958,0	-75.435,5	-83.410,7	28.418,2
Rasio Ekspor Barang dan Jasa thdp Impor Barang dan Jasa	1,10	0,98	0,97	0,97	1,01

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Selama periode 2011 - 2015, posisi perdagangan barang dan jasa dengan luar negeri tidak selalu menunjukkan nilai positif, atau neraca perdagangan barang dan jasa Indonesia tidak selalu dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai **tabungan luar negeri**.

Surplus perdagangan Indonesia yang terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2015, tercatat surplus perdagangan Indonesia sebesar 193.811,2 miliar rupiah dan 28.418,2 miliar rupiah. Namun pada tahun 2012 sampai dengan 2014 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami defisit dimana nilai impor lebih besar daripada ekspor yaitu minus 33.958,0 miliar rupiah, minus 75.435,5 miliar rupiah dan minus 83.410,7 miliar rupiah. Sementara dilihat dari rasio ekspor barang dan jasa terhadap impor barang dan jasa cenderung menurun dari tahun 2011 ke 2014 menurun yaitu dari 1,10 pada tahun 2011 menjadi 0,97 pada tahun 2014 dan membaik pada tahun 2015 sebesar 1,01.

4.11. Rasio Perdagangan Internasional (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional, apakah didominasi oleh ekspor atau impor. Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor dikurangi impor dibagi dengan jumlah ekspor dan impor. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Artinya jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional Tahun 2011 - 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.061.886,2	2.118.979,0	2.283.776,7	2.497.116,4	2.434.180,6
Nilai Impor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	1.868.075,0	2.152.937,0	2.359.212,1	2.580.527,1	2.405.762,4
(X - M) (Miliar Rp)	193.811,2	-33.958,0	-75.435,5	-83.410,7	28.418,2
(X +M) (Miliar Rp)	3.929.961,1	4.271.916,0	4.642.988,8	5.077.643,5	4.839.943,0
R P I	0,05	-0,01	-0,02	-0,02	0,01

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2011-2015, posisi ekspor barang dan jasa lebih tinggi dari impor barang dan jasa hanya terjadi pada tahun 2011 dan 2015, namun pada tahun 2012 dan 2014 posisi ekspor lebih rendah dari impor. Nilai ekspor barang dan jasa pada tahun 2011 sebesar 2.061.886,2 miliar rupiah, lebih tinggi dari nilai impor barang dan jasa yaitu sebesar 1.868.075,0 miliar rupiah. Begitu pula terjadi di tahun 2015, nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2.434.180,6 miliar rupiah lebih tinggi dari nilai impor barang dan jasa sebesar 2.405.762,4 miliar rupiah.

Hal sebaliknya, pada periode 2012-2015 nilai ekspor barang dan jasa lebih rendah dari nilai impor barang dan jasa sehingga net ekspor menjadi negatif masing-masing sebesar minus 33.958,0 miliar rupiah (2012), minus 75.435,5 miliar rupiah (2013) dan minus 83.410,7 miliar rupiah (2014).

Rasio Perdagangan Internasional Indonesia pada tahun 2011 dan 2015 mengindikasikan bahwa perdagangan internasional Indonesia selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, meskipun dengan rasio yang cukup kecil yaitu kurang dari 0,1, sedangkan pada tahun 2012-2014 rasio perdagangan internasional Indonesia didominasi oleh impor karena rasio yang menunjukkan tanda minus.

4.12. Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri

Nilai tukar perdagangan luar negeri (*Term of Trade*) sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga barang ekspor maupun harga barang impor.

Ada dua parameter yang dibahas yaitu Indeks Nilai Tukar (I_{NT}) dan Kapasitas Impor (K_M) yang masing-masing menjelaskan tentang daya beli dan kemampuan mengimpor berdasarkan nilai ekspor. Indeks nilai tukar diperoleh dengan cara membagi indeks implisit (harga) ekspor (II_X) dengan indeks implisit (harga) impor (II_M). Sedangkan K_M diperoleh dengan cara membagi nilai ekspor adh Berlaku dengan indeks implisit impor, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 26. Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri Tahun 2011 – 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.061.886,2	2.118.979,0	2.283.776,7	2.497.116,4	2.434.180,6
Nilai Impor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	1.868.075,0	2.152.937,0	2.359.212,1	2.580.527,1	2.405.762,4
Indeks Implisit Ekspor Barang dan Jasa	107,71	108,94	112,72	122,03	121,35
Indeks Implisit Impor Barang dan Jasa	105,61	112,70	121,24	129,77	128,49
Indeks nilai tukar (I_{NT})	101,99	96,66	92,97	94,04	94,44
Kapasitas Impor	1.952.335,6	1.880.168,6	1.883.648,5	1.924.261,5	1.894.470,8

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Kemampuan mengimpor pada tahun 2011 adalah 1.952.335,6 miliar rupiah dan menurun menjadi 1.880.168,6 miliar rupiah pada tahun 2012. Sedangkan kemampuan mengimpor pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.883.648,5 miliar rupiah dan 1.924.261,5 miliar rupiah pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kemampuan mengimpor kembali menurun menjadi 1.894.470,8 miliar rupiah.

4.13. Rasio Pendapatan Nasional (PN) Terhadap PDB

Merupakan perbandingan antara Pendapatan Nasional yang dihasilkan terhadap Nilai Tambah Bruto (PDB pendekatan lapangan usaha) sebagai sumber terciptanya pendapatan bagi masyarakat. Berbagai sektor produksi mengalokasikan balas jasa faktor produksi pada pemilik faktor produksi yang sebagian besar dimiliki oleh rumah tangga. Untuk mendapatkan gambaran pendapatan yang secara potensial akan diterima masyarakat, maka unsur yang bukan merupakan faktor pendapatan harus dikeluarkan dari penghitungan, seperti penyusutan dan pajak tidak langsung (neto), yang hasilnya kemudian disebut sebagai pendapatan domestik. Kemudian untuk menghitung pendapatan nasional, maka pendapatan domestik tersebut harus ditambah dengan pendapatan faktor yang masuk setelah dikurangi dengan pendapatan faktor yang keluar. Sementara itu untuk mendapatkan pendapatan yang benar-benar diterima (atau siap dibelanjakan) maka pendapatan nasional tersebut harus ditambah dengan penerimaan transfer setelah dikurangi pembayaran transfer (khusus untuk transfer berjalan).

**Tabel 27. Rasio Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Terhadap PDB
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB (Miliar Rp)	7.831.726,0	8.615.704,5	9.546.134,0	10.565.817,3	11.540.789,8
Pendapatan Nasional (PN) (Miliar Rp)	5.967.173,9	6.510.395,3	7.188.558,5	7.907.963,2	8.430.122,9
Rasio PN/PDB	76,19	75,56	75,30	74,84	73,05
Pendapatan Disposabel (PD) (Miliar Rp)	6.003.797,4	6.548.706,7	7.232.140,1	7.969.762,5	8.503.415,5
Rasio PD/PDB	76,66	76,01	75,76	75,43	73,68

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data selanjutnya menunjukkan bahwa dari nilai tambah yang dihasilkan setiap tahun ada sebagian yang tidak diterima oleh masyarakat. Sebagian pendapatan faktor produksi lebih banyak yang dibayarkan ke luar negeri dari pada yang diterima dari luar negeri (posisi defisit). Sementara, penerimaan transfer dari luar negeri lebih besar dari transfer yang dibayarkan ke luar negeri (posisi surplus), sehingga menyebabkan adanya penambahan pendapatan masyarakat di wilayah domestik.

Pada tahun 2011, dari PDB yang dihasilkan sebesar 7.831.726,0 miliar rupiah ada sebesar 76,19 persen yang menjadi pendapatan nasional dan 76,66 persen yang menjadi pendapatan disposabel. Setelah tahun 2011, pendapatan nasional maupun pendapatan disposabel mengalami peningkatan secara nominal setiap tahunnya namun persinya mengalami penurunan.

Pendapatan Nasional secara nominal meningkat dari sebesar 5.967.173,9 miliar rupiah pada tahun 2011 menjadi sebesar 6.510.395,3 miliar rupiah pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013-2015 masing-masing sebesar 7.188.558,5 miliar rupiah, 7.907.963,2 miliar rupiah dan 8.430.122,9 miliar rupiah. Sedangkan jika dilihat porsi pendapatan nasional terhadap produk domestik bruto menurun dari sebesar 76,19 persen ditahun 2011 menjadi 75,56 persen ditahun 2012, kondisi ini juga terjadi di tahun 2013-2015 yaitu masing-masing sebesar 75,30 persen, 74,84 persen dan 73,05 persen.

Senada dengan pendapatan nasional, nilai pendapatan disposable meningkat setiap tahunnya dalam rentang waktu tahun 2011-2015. Masing-masing sebesar 6.003.797,4 miliar rupiah (2011); 6.548.706,7 miliar rupiah (2012); 7.232.140,1 miliar rupiah (2013); 7.969.762,5 miliar rupiah (2014) dan 8.503.415,5 miliar rupiah (2015). sebaliknya porsi pendapatan disposabel terhadap produk domestik bruto menurun setiap tahun masing-masing sebesar 76,66 persen (2011); 76,01 persen (2012); 75,76 persen (2013); 75,43 persen (2014) dan 73,68 persen (2015).

4.14. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter Nilai Tambah.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t
 Y_t = Output tahun ke t
 Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 28. Incremental Capital Output Ratio
Tahun 2010 – 2014

Uraian	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB (ADHK)					
(miliar rupiah)	7,287,635.3	7,727,083.4	8,156,497.8	8,566,271.2	8,976,931.5
Perubahan					
(miliar rupiah)	423,502.2	439,448.1	429,414.4	409,773.4	410,660.3
PMTB (ADHK 2010)					
(miliar Rp)	2,316,359.1	2,527,728.8	2,654,375.0	2,775,733.6	2,916,601.6
ICOR	5.47	5.75	6.18	6.77	7.10

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR pada tahun 2011 sebesar 5,47 yang berarti bahwa untuk menaikkan 1 unit output diperlukan penambahan kapital sebesar 5,47 unit. Pada tahun berikutnya ICOR tercatat sebesar 5,75 (2012); 6,18 (2013); 6,77 (2014) dan 7,10 (2015).

<http://www.bps.go.id>

BAB V

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran kinerja suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan *System of National Accounts* (SNA) yang berlaku secara internasional. SNA menyajikan aturan dan prinsip akuntansi secara umum, yang wajib digunakan oleh seluruh negara dalam menyusun statistik neraca nasional. Namun dalam implementasinya, ada beberapa ketentuan yang harus disesuaikan, karena masalah ketersediaan data dan sistem perstatistikan yang berlaku di negara masing-masing. Secara bertahap, Indonesia telah melakukan penyesuaian yang dimaksud. SNA yang telah disesuaikan dengan kondisi perstatistikan yang ada di Indonesia disebut sebagai Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI).

Selama ini, penghitungan PDB didasarkan pada SNNI versi lama, yaitu SNNI yang didasarkan pada SNA 1968 dan SNA 1993. Sejalan dengan program perubahan tahun dasar PDB (dari tahun 2000 menjadi 2010) dan implementasi SNA 2008, penghitungan PDB menggunakan SNNI versi baru³¹. Beberapa penyesuaian yang dilakukan BPS atas SNA 2008, tertuang dalam sistem baru ini. Penyesuaian tersebut bersifat menyeluruh, mencakup konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi; metode penghitungan; dan sumber data yang digunakan. SNNI versi baru itu disebut sebagai SNNI 2010.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran kinerja perekonomian tingkat nasional. Untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota ukuran ini disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan menggunakan pedoman penyusunan yang sama (SNNI 2010), hasil penghitungan PDB dan PDRB akan konsisten.

31 SNNI versi baru (SNNI 2010) menggunakan SNA 2008 sebagai dasar dalam menghitung statistik neraca nasional (PDB/PDRB dan neraca-neraca lainnya seperti neraca produksi, neraca penggunaan pendapatan, dan neraca modal)

Pada dasarnya seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (unit residen -rumahtangga, lembaga non-profit, pemerintah, perusahaan- maupun unit nonresiden) harus dicatat secara konsisten dan sistematis, dengan menggunakan standar aturan dan akuntansi yang berlaku secara umum. Khusus untuk penghitungan PDB/PDRB, aturan dan akuntansi yang perlu diperhatikan adalah bahwa :

- Total suplai (produk domestik/impor) dengan total permintaan (antara dan akhir) untuk setiap industri harus sama
- Total output dengan total input (input antara dan input primer) suatu industri, harus sama
- Total pendapatan yang tercipta dalam suatu perekonomian dengan input primer yang digunakan dalam aktivitas produksi, harus sama

Ketiga aturan akuntansi tersebut di atas, merupakan dasar di dalam penghitungan PDB baik dengan pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), maupun pendapatan (*income approach*).

Dari sisi yang lain, PDB menggambarkan seluruh output perekonomian suatu negara/wilayah selama kurun waktu tertentu. PDB diukur berdasarkan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi dalam batas-batas teritori suatu negara atau wilayah pada kurun waktu satu tahun atau satu triwulan.

Data PDB dalam konteks tersebut di atas, akan berkorelasi positif dengan standar hidup penduduk, sehingga data PDB sering kali digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Sungguhpun demikian, karena PDB merupakan ukuran kinerja atau aktivitas ekonomi, maka bukan merupakan ukuran yang tepat untuk menggambarkan standar hidup atau kesejahteraan masyarakat. PDB sebagai ukuran

standar hidup banyak dikritisi oleh berbagai pihak. Untuk itu banyak negara melakukan langkah-langkah alternatif untuk meningkatkan kualitas data PDB, agar lebih akomodatif terhadap pengukuran standar hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Series PDB/PDRB yang panjang dan konsisten, juga merupakan data yang dibutuhkan oleh para pengguna, khususnya para peneliti, statistisi, maupun para perencana pembangunan. Untuk itu upaya mengkonsistenkan data PDB dengan tahun dasar yang berbeda, maupun data PDB dengan tiga pendekatan yang berbeda, perlu dilakukan. Proses konsistensi dan realibilitas series data PDB/PDRB tersebut dilakukan melalui proses *benchmarking* dan *rebasing*. Agar tetap terjaga konsistensinya, proses ini akan dilakukan oleh BPS secara berkesinambungan.

Proses *benchmarking*³² dan *rebasing*³³ data PDB/PDRB di Indonesia termasuk salah satu perubahan yang diadopsi di dalam sistem penghitungan yang baru (SNNI 2010). Selama ini data PDB/PDRB didiseminasi dengan menggunakan tahun dasar dan pendekatan yang berbeda, sehingga perlu diselaraskan dengan menggunakan tahun dasar yang sama (tahun dasar 2010³⁴) di dalam suatu kerangka kerja yang baru dalam hal ini kerangka kerja SNNI2010.

32 *Benchmarking* merupakan proses penetapan level PDB/PDRB, dengan menggunakan Tabel SUT sebagai *benchmark* (level dasar)

33 *Rebasing* merupakan proses merubah tahun dasar PDB/PDRB lama (tahun 2000) dengan tahun dasar baru (tahun 2010)

34 Tahun dasar 2010 adalah tahun dasar baru, dan sistem penghitungan yang digunakan telah berbasis SNA 2008 (SNNI 2010)

5.1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT)

Unit institusi dalam suatu perekonomian dapat dikelompokkan ke dalam lima sektor, yaitu korporasi non-finansial, korporasi finansial, pemerintahan umum, rumahtangga dan LNPRT. Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDB Pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi bagi sektor institusi lainnya untuk melakukan aktivitas produksi.

a. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumahtangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Barang dan jasa yang dikonsumsi, dalam bentuk:

- makanan dan minuman, baik dalam bentuk bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;

- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- barang lainnya, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- jasa-jasa, seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus, buku dsj.), jasa transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan jasa pekerja domestik yang dibayar (pembantu, supir, perawat dsj);
- barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumahtangga, dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh non-residen diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak diduplikasi (tidak diproduksi kembali), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan sebagai PK-RT.

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan, karena dalam hal ini rumahtangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah itu milik sendiri. Apabila rumahtangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumahtangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumahtangga, tidak termasuk dalam PK-RT. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar atau pembelian rumah. Demikian halnya pengeluaran untuk transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai PK-RT. Berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi rumahtangga dapat diklasifikasi ke dalam 12 (dua belas) COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*), yaitu:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

b. Metode Penghitungan dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PK-RT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Banyaknya penduduk tahunan,
- Data Sekunder (dari BPS maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

Selama ini, penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan penyesuaian, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplay dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti (*me-replace*) hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. *Replacement* dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Asumsinya, bahwa hasil penghitungan dari data sekunder lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas akan menghasilkan besarnya PK-RT adh Berlaku. Untuk memperoleh PK-RT adh Konstan 2010, maka PK-RT Berlaku terlebih dahulu

dikelompokan menjadi 12 kategori COICOP. PK-RT Konstan diperoleh dengan cara deflate PK-RT Berlaku dengan IHK 12 katagori COICOP yang sesuai.

5.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PK-LNPRT)

Sektor lembaga non-profit yang melayani rumahtangga (LNPRT) merupakan pelengkap dari sektor institusi yang ada di dalam suatu perekonomian. Munculnya sektor ini sebagai sektor tersendiri memberi gambaran atas seluruh proses ekonomi dan peranan yang dilakukan sektor institusi dalam perekonomian. Sektor institusi dalam total ekonomi dibedakan atas lima sektor, yaitu sektor korporasi non-finansial, korporasi finansial, pemerintahan umum, rumahtangga dan LNPRT. Sektor LNPRT menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi.

a. Konsep dan Definisi

1. LNPRT (Lembaga non Profit yang melayani Rumah Tangga)

LNPRT merupakan bagian dari keseluruhan lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan masing-masing fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga. LNPRT merupakan lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi bagi anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah³⁵. Harga yang tak berarti secara ekonomi adalah harga yang tidak punya pengaruh signifikan pada jumlah produsen yang ingin menyediakan barang dan jasa, serta pada jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen.

35 SNA 2008: 4.93

Pedoman untuk mengidentifikasi apakah suatu harga berarti secara ekonomi atau tidak, adalah jika harga itu menutup setengah biaya produksi. Jika tidak, harga ini tidak berarti secara ekonomi (berbasis *non-market*). Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

Tabel 2.2.1. Klasifikasi Jenis LNP menurut Sektor Institusi

Jenis LNP	Sektor Kelembagaan
1. LNP yang menyediakan jasa ke korporasi (biasanya beranggotakan perusahaan)	Korporasi
2. LNP yang dikontrol pemerintah dan menyediakan jasa (individu atau kolektif) berbasis non-pasar	Pemerintahan
3. LNP yang menyediakan barang dan jasa ke rumahtangga dengan harga yang signifikan secara ekonomi	Korporasi
4. LNP yang menyediakan jasa ke rumahtangga secara gratis atau dengan harga yang tak-berarti secara ekonomi	Lembaga Non-Profit Rumahtangga (LNPRT)
5. LNP yang menyediakan jasa kolektif secara gratis atau dengan harga yang tidak berarti secara ekonomi	Lembaga Non-Profit Rumahtangga (LNPRT)

i. LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi

LNP kelompok ini mencakup LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi dengan memungut biaya atau iuran untuk biaya penyediaan jasa-nya. Tingkat biaya atau harga ini termasuk dalam kriteria harga yang berarti secara ekonomi (*economically significant price*). Jasa layanan ini dijual pada anggota (korporasi), dan diperlakukan sebagai konsumsi antara di korporasi tersebut. LNP semacam ini umumnya berbentuk asosiasi yang menyediakan jasa khusus bagi anggota. Sebagian besar LNP didirikan oleh korporasi, dan dirancang untuk kepentingan promosi. Contoh: kamar dagang, asosiasi produsen pertanian, manufaktur, atau perdagangan, organisasi pengusaha penelitian dan pengujian laboratorium, atau lembaga lain yang terlibat dalam aktivitas untuk kepentingan umum atau kelompok yang mengontrol keuangannya.

ii. LNP yang dikontrol oleh pemerintah

LNP kelompok ini mencakup LNP yang dikontrol oleh pemerintah, dan menjual jasanya pada tingkat harga yang berbasis non-market, yaitu tingkat harga yang tidak didasarkan atas biaya produksi, bahkan diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Kontrol atas LNP didefinisikan sebagai kewenangan dalam menentukan kebijakan dan program lembaga.

Dalam menentukan apakah suatu LNP dikontrol pemerintah, ada lima indikator yang perlu dipertimbangkan yakni :

1. Penunjukan petugas, dalam hal ini pemerintah berhak menunjuk petugas pengelola lembaga, berdasarkan konstitusi, anggaran dasar, atau instrumen lainnya;

2. Instrumen lain, instrumen yang berisi ketentuan lain di luar penunjukkan petugas, yang memungkinkan pemerintah menentukan aspek penting dalam kebijakan umum atau program lembaga;
3. Kontrak perjanjian, keberadaan perjanjian antara pemerintah dan lembaga memungkinkan pemerintah menentukan aspek kunci dalam kebijakan umum atau program lembaga;
4. Tingkat pembiayaan, lembaga yang utamanya dibiayai pemerintah dapat dikontrol oleh pemerintah. Secara umum, jika LNP dapat menentukan kebijakan atau program sepanjang garis yang tersebut pada indikator sebelumnya, dianggap tidak dikontrol oleh pemerintah;
5. Eksposur risiko, jika pemerintah secara terbuka dimungkinkan akan terkena seluruh atau sebagian risiko finansial yang terkait dengan aktivitas lembaga, maka pengaturan itu merupakan bentuk kontrol.

iii. LNP yang menyediakan jasa bagi rumahtangga

Kelompok LNP ini dibedakan atas :

- LNP yang menyediakan barang dan jasa bagi rumahtangga, dengan tingkat harga yang berarti secara ekonomi. Output lembaga semacam ini sebesar biaya yang dikeluarkan oleh rumahtangga.
- LNP yang menyediakan jasa bagi rumahtangga secara gratis atau dengan tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi (non-komersial). Output lembaga ini sebesar biaya yang dikeluarkan oleh LNPRT dan dikeluarkan (aktual) oleh rumahtangga.
- LNP yang menyediakan jasa kolektif secara gratis atau dengan harga yang tidak berarti secara ekonomi. Output lembaga ini sebesar biaya yang

dikeluarkan (aktual) oleh LNPRT. Jasa kolektif umumnya dikonsumsi seluruh masyarakat, seperti hasil penelitian yang dapat diakses setiap orang, administrasi publik nasional dan daerah, dsb. Dalam teori ekonomi, jasa kolektif disebut sebagai barang publik (*public goods*).

2. Pengeluaran konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT)

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output ini dihitung dari seluruh pengeluaran LNPRT untuk melakukan aktivitas operasional-nya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

LNPRT mencakup LNP yang termasuk kelompok LNP yang melayani rumah tangga. LNPRT ini dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

i. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi, dan terdiri dari:

- ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ICMI,
- ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila,
- ormas wanita, seperti Fatayat, Kalyana Mitra Wanita, dan
- ormas lain seperti Kosgoro, Partai Politik, dan Pepabri

ii. Organisasi Sosial (Orsos)

Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik yang mempunyai badan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, dan terdiri dari panti asuhan, panti wreda, panti lainnya, seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya.

iii. Organisasi Profesi (Orprof)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat, dan terdiri dari:

- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Sosial, seperti: ISEI, IAI, dsj.
- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti: PII, IDI, dsj.

iv. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat untuk mengembangkan apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang bersifat sosial, dan terdiri dari :

- Perkumpulan sosial seperti Perkumpulan Rotari Indonesia, WIC;
- Organisasi Kebudayaan seperti Padepokan Seni dan Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan;
- Organisasi Olahraga seperti PSSI, PBSI, Ikatan Motor Indonesia; dan
- Organisasi Hobi seperti Ikatan Penggemar Anggrek, ORARI, dan Wanadri.

v. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya, dan terdiri dari:

- LSM Penyebar Informasi seperti PKBI, YLKI, Walhi;
- LSM Pendidikan dan Pelatihan seperti LP3ES, Yayasan Bina Swadaya;
- LSM Konsultasi dan Advokasi seperti YLBHI;
- LSM Penelitian dan Studi Kebijakan seperti Lembaga Studi Pembangunan, Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia.

vi. Lembaga Keagamaan

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, mensyiarkan agama, dan terdiri dari:

- Organisasi Islam, seperti Lembaga Dakwah, Remaja Masjid, Majelis Taklim;
- Organisasi Kristen/Protestan, seperti PGI, KWI, HKBP;
- Organisasi Hindu/Budha seperti Walubi, Parisadha Hindu Dharma;
- Perkumpulan Jamaah Masjid;
- Perkumpulan Jemaat Gereja/tempat ibadah lain;
- Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya.

vii. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberi bantuan pada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama, solidaritas, dan terdiri dari:

- Lembaga Bantuan Kemanusiaan, seperti Yayasan Kesejahteraan Gotong Royong, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat;
- Lembaga Bantuan Pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar;

- Lembaga Bantuan Lainnya.

b. Metode Penghitungan dan Sumber Data

1. Sumber data

i. PK-LNPRT Tahunan adh Berlaku

- Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis input.

Data berasal dari hasil pengolahan Survei Khusus Lembaga Non-profit, dengan unit sampling LNPRT dan lag satu tahun (SK-LNP 2011 berisi data 2010). Survei ini dilaksanakan setiap tahun di beberapa provinsi. Provinsi yang terkena sampel dapat menggunakan data ini untuk penghitungan. Sedangkan provinsi yang tidak terkena sampel, dapat menggunakan hasil SK-LNP provinsi lain yang karakteristik LNPRT-nya mirip.

- Populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

Populasi LNPRT menurut jenis lembaga diperoleh dari Kesbanglinmas setempat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Departemen agama dan kantor lain yang punya informasi tentang jumlah organisasi di wilayahnya. Untuk provinsi yang terkena sampel SKLNP dapat menggunakan data hasil *up-dating* direktori LNPRT.

ii. PK-LNPRT Tahunan adh Konstan

Data yang diperlukan untuk menghitung PK-LNPRT Tahunan adalah data PK-LNPRT Triwulanan adh Konstan.

2. Metode penghitungan

i. PK-LNPRT Tahunan adh Berlaku

Dengan asumsi bahwa lembaga ini tidak melakukan kegiatan ekonomis produktif, maka nilai PK-LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT³⁶ sama dengan nilai konsumsi (antara) ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, penyusutan, dan pajak atas produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika menggunakan *input* yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, dengan menggunakan hasil survei khusus lembaga non-profit (SKLNP). Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan input. Rata-rata pengeluaran diperoleh dari hasil SKLNP yang dilaksanakan setiap tahun.

Rumusan rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya adalah sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan input

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan input

³⁶ Biaya produksi LNPRT sama dengan konsumsi akhir LNPRT

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Input LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Estimasi PK-LNPRT, setelah nilai rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga, dan populasi LNPRT diperoleh, maka estimasi PK-LNPRT menggunakan rumusan :

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

\bar{X} : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

ii. PK-LNPRT Tahunan adh Konstan

PK-LNPRT Tahunan adh Konstan dihitung dengan menjumlahkan PK-LNPRT Triwulanan adh Konstan, sbb:

$$Y = Y_{Q1} + Y_{Q2} + Y_{Q3} + Y_{Q4}$$

Y : PK-LNPRT adh Konstan Tahunan

Y_{Q1} : PK-LNPRT adh Konstan Triwulan I

Y_{Q2} : PK-LNPRT adh Konstan Triwulan II

Y_{Q3} : PK-LNPRT adh Konstan Triwulan III

Y_{Q4} : PK-LNPRT adh Konstan Triwulan IV

5.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan baik sebagai konsumen, produsen, dan sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Dalam *System of National Accounts (SNA) 2008*, disebutkan bahwa unit pemerintah merupakan unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Di peran di atas, pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

a. Konsep dan Definisi

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Untuk sektor pemerintah, besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan output pemerintah. Untuk itu PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 1968, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup aktivitas :

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, yaitu :

- a. Berdasarkan apakah barang atau jasa diproduksi oleh produsen pasar atau non-pasar.
- b. Berdasarkan apakah pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran kolektif atau individu.
- c. Berdasarkan fungsi (*COFOG /Classification of the Functions of Government*).
- d. Berdasarkan jenis barang dan jasa (*CPC /Central Product Classification*).

b. Metode Penghitungan dan Sumber data

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adalah pengeluaran atas barang dan jasa yang di konsumsi oleh pemerintahan umum, terdiri dari jasa kolektif serta barang dan jasa individu tertentu.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terdiri dari output non-pasar kurang penerimaan penjualan insidental/penerimaan penjualan barang dan jasa tambah nilai barang dan jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk disalurkan ke individu rumah tangga dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (*social transfer in-kind*). Sepanjang teridentifikasi sebagai suatu unit institusi yang terpisah, maka bank sentral dimasukkan ke dalam institusi sektor finansial dan tidak termasuk sektor pemerintahan umum. Pengeluaran konsumsi kolektif sehubungan dengan jasa kebijakan moneter, dicatat sebagai pengeluaran pemerintah, tetapi dalam hal ini pemerintah tidak memperoleh biaya yang diperoleh bank sentral. Sehingga transfer current nilai output non-pasar harus dicatat sebagai pembayaran oleh bank sentral dan diterima pemerintah untuk menutup pembelian output non-pasar bank sentral oleh pemerintah.

Output non-pasar terdiri dari barang dan jasa individu atau kolektif yang dihasilkan lembaga non-profit yang melayani rumahtangga (LNPRT) atau pemerintah, yang disediakan secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak signifikan secara ekonomi ke unit lain atau masyarakat secara keseluruhan.

Nilai output non-pasar yang disediakan untuk rumahtangga baik tanpa dikenakan biaya atau dengan biaya yang tidak signifikan, diestimasi sebagai jumlah biaya produksi sbb:

- a. Konsumsi antara
- b. Kompensasi pekerja;
- c. Konsumsi barang modal tetap;
- d. Pajak lainnya (kurang subsidi) atas produksi

Social transfer in-kind adalah pengeluaran pemerintah atau LPNRT atas barang atau jasa yang dihasilkan produsen pasar yang langsung diberikan ke rumahtangga, secara individu atau kolektif tanpa pengolahan lebih lanjut. *Social transfer in-kind* di Indonesia teridentifikasi sebagai Beras Miskin (Raskin).

5.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah, melalui peningkatan kapasitas produksi. Di dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi dalam bentuk fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI).

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

a. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal bekas pada pihak lain.

PMTB menggambarkan penambahan dan pengurangan barang modal yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode. Secara umum, barang modal dapat diklasifikasikan menurut 4 (empat) golongan, yaitu : menurut jenis barang modal, menurut industri atau lapangan

usaha, menurut institusi, dan menurut wilayah asal. Dalam kerangka penyusunan PDB/PDRB, PMTB dirinci menurut jenis barang modal.

PMTB terdiri dari:

- i. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- ii. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- iii. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Penambahan aset dapat terjadi karena pembelian, produksi, barter, transfer, sewa beli (*financial leasing*), pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya, dan perbaikan besar aset. Sedangkan pengurangan aset dapat terjadi karena penjualan, barter, transfer atau sewa beli. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

b. Metode Penghitungan dan Sumber Data

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai).

- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga.
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang/jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut

dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di- “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu,

data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Sementara itu, bila akan dilakukan penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), maka akan ditemui beberapa permasalahan seperti:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis.

Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

5.5 Perubahan Inventori (PI)

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi

pada kurun waktu tertentu di dalam wilayah suatu region. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Sehingga ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

a. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori atau yang lazimnya dikenal sebagai “persediaan” adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Dalam kerangka PDB atau Tabel I-O, inventori disajikan sebagai bagian dari konsumsi akhir (*final demand*), tepatnya terletak pada kuadran II di dalam tabel I-O. Selama ini pada kedua kerangka data tersebut, inventori diperlukan sebagai komponen residual yang di dalamnya termasuk pula perbedaan statistik (*statistical discrepancy*). Kondisi ini menyebabkan informasi tentang inventori sulit dipahami dan dianalisis lebih jauh. Secara konsep, inventori dalam bentuk persediaan barang menggambarkan bagian dari output domestik dan impor yang belum digunakan, baik untuk diproses lebih lanjut, dikonsumsi maupun untuk tujuan dijual tanpa diproses lebih lanjut. Inventori yang dimaksud dapat berbentuk bahan baku (*raw material*), barang setengah jadi (*work in progress*) ataupun barang jadi (*finished goods*).

Komponen perubahan inventori mulai diperkenalkan bersamaan dengan terjadinya perubahan tahun dasar di tingkat nasional dari tahun dasar 1993 ke tahun

2000, tepatnya pada triwulan I tahun 2004. Terkait dengan perubahan tahun dasar 2000 ke tahun 2010 maka komponen perubahan inventori perlu dihitung tersendiri, terpisah dari *statistical discrepancy*. Dengan demikian, perubahan inventori atau perubahan stok tidak diperlakukan sebagai komponen penyeimbang (*balancing item*) pada PDB menurut penggunaan.

Inventori merupakan persediaan barang pada unit institusi, yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, atau belum selesai diproses, atau belum terjual. Sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Dalam konteks mikro (atau perusahaan), inventori menjelaskan informasi tentang posisi cadangan atau persediaan barang jadi atau barang dalam pengerjaan (setengah jadi) yang dikuasai perusahaan pada satu saat, yang tercatat dalam laporan neraca akhir tahun. Selain hal tersebut, di dalamnya termasuk barang dagangan dan atau barang dalam perjalanan. Dalam laporan keuangan, inventori dicatat sebagai bagian dari harta lancar (*current asset*) pada sisi kiri neraca, yang menggambarkan bagian dari aset atau kekayaan perusahaan. Umumnya data tersebut disajikan secara agregat (tidak dirinci menurut jenis inventori) bersama dengan komponen harta lancar lain, termasuk nilai penyisihan atas inventori yang rusak atau usang. Selain para produsen (*inventory holder*), penguasa inventori adalah pelaku industri perdagangan, pemerintah dan rumah tangga. Masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda dalam melakukan penimbunan barang inventori.

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan

penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Dalam statistik neraca nasional, inventori diperlakukan sebagai bagian dari pembentukan modal atau dikenal sebagai inventasi fisik. Tepatnya, informasi inventori menjelaskan tentang porsi dari investasi yang telah terealisasi dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi di dalam berbagai aktivitas produksi. Dalam kenyataannya sebagian dari investasi tersebut direalisasikan untuk pengadaan berbagai keperluan bahan baku maupun bahan penolong. Dengan demikian maka tersedianya data inventori akan menjadi informasi yang cukup penting untuk analisis investasi khususnya analisis komponen pembentukan modal, meskipun kontribusinya di dalam perekonomian tidaklah terlalu besar.

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara atau konsumsi akhir. Data tentang jenis inventori yang dikuasai oleh perusahaan dicatat secara terpisah pada bagian yang berbeda. Klasifikasi inventori menurut jenis barang adalah sbb:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

b. Metode Penghitungan dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;

- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjen Kementan.

Metoda yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori adalah pendekatan dari sisi “korporasi” sebagai pendekatan “langsung” dan dari sisi “komoditas” sebagai pendekatan tidak langsung. Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di saat tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung atau sering kali disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori.

Nilai perubahan barang inventori *adh Ber laku* diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori *adh Konstan* dihitung dengan *mendeflate* nilai perubahan inventori *adh Ber laku* dengan indeks harga yang sesuai, atau mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

5.6 Ekspor/Impor Barang dan Jasa

Ekspor dan impor merupakan aktivitas perdagangan barang dan jasa produk domestik dengan pihak di luar negeri. Secara konsep, transaksi ini terjadi antara pihak

“residen” dengan “non-residen”. Transaksi ekspor akan menambah devisa, sebaliknya transaksi impor akan mengurangi devisa negara. Dalam penghitungan PDB, barang dan jasa yang berasal dari impor bukan merupakan bagian dari output domestik. Untuk itu nilai impor harus dikurangkan dari PDB.

a. Konsep dan Definisi

Ekspor dan Impor merupakan aktivitas perdagangan barang dan jasa antara penduduk³⁷ Indonesia dengan penduduk negara lain. Dalam transaksi ekspor, termasuk pembelian langsung penduduk negara lain atas barang dan jasa di wilayah domestik, seperti pembelian barang dan jasa oleh wisatawan asing di wilayah Indonesia. Begitu pula sebaliknya, pembelian langsung barang dan jasa di luar negeri oleh penduduk Indonesia dikategorikan sebagai impor. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ekspor dan impor adalah transaksi perdagangan dengan pihak luar negeri (*external transaction*) baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Barang ekspor maupun barang impor dibedakan menurut kelompok : minyak bumi dan gas dan bukan-minyak bumi dan gas. Ekspor dan impor³⁸ barang dinilai menurut harga *Free on Board* (FOB)³⁹. Sementara data ekspor dan impor yang diperoleh dari Subdit Statistik Ekspor maupun Subdit Statistik Impor masih dalam kurs dolar Amerika (\$ US), sehingga nilai tersebut perlu dikonversikan ke dalam satuan rupiah. Untuk ekspor konversinya menggunakan rata-rata kurs “beli” dolar AS yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan. Sedangkan impor konversinya menggunakan rata-rata kurs “jual” dolar AS yang ditimbang dengan nilai nominal

³⁷ Menggunakan konsep “residen”

³⁸ Konsep sebelumnya menurut harga CIF (*Cost Insurance and Freight*)

³⁹ Harga diatas kapal, tidak termasuk biaya angkut, premi asuransi dan biaya pelabuhan lainnya

transaksi impor bulanan. Hasil estimasi nilai ekspor maupun impor barang dan jasa yang telah dikonversi dalam satuan rupiah, merupakan nilai transaksi ekspor dan impor adh Berlaku.

Untuk menghitung nilai ekspor dan impor adh Konstan, dibedakan antara produk dalam bentuk barang dan produk jasa. Untuk produk barang diperoleh dengan cara mendeflasi nilai ekspor atau impor adh Berlaku dengan indeks harga per-unit (IHPU) masing-masing kelompok barang ekspor maupun impor. Sedangkan untuk produk jasa diperoleh dengan cara membagi nilai ekspor atau impor adh Berlaku dengan indeks harga per-unit barang ekspor dan barang impor yang dikombinasi dengan indeks implisit jasa-jasa terseleksi.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi nilai ekspor dan impor, selain dari BPS, juga dari Bank Indonesia (BI). Untuk nilai ekspor maupun nilai impor barang, data yang digunakan bersumber dari BPS, sedangkan ekspor dan impor jasa bersumber dari BI.

5.7 Penyusutan (Depresiasi)

Penyusutan merupakan bagian dari biaya produksi, yang menjelaskan tentang berkurangnya nilai barang modal secara ekonomi. Penyusutan bukan faktor pendapatan sehingga harus dikeluarkan dari penghitungan PDB.

a. Konsep dan Definisi

Penyusutan merupakan pengurangan nilai barang modal dalam suatu periode akuntansi. Pengurangan atau susutnya nilai barang modal (kapital) bisa secara ekonomis maupun teknis, karena digunakan dalam suatu proses produksi. Agar supaya nilai aset kembali pada posisi semula, maka harus dilakukan pengembalian barang modal melalui penyisihan nilai kapital ausnya nilai barang modal dalam proses produksi. Nilai susut ini

kemudian disebut sebagai depresiasi (*consumption of fixed capital*). Di sisi lain, penyusutan yang merupakan tabungan di perusahaan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan investasi fisiknya.

b. Metode Penghitungan dan Sumber Data

Penyusutan diperhitungkan dari nilai PMTB, atau dari nilai barang modal yang ada (stok kapital). Dari hasil kajian, menunjukkan bahwa usia pakai barang modal antar jenis sangatlah bervariasi, yakni antara 3 s.d 60 tahun. Rasio nilai penyusutan setiap tahun diasumsikan sama besar, atau menggunakan proporsi yang sama antar tahun. Untuk itu, digunakan rata-rata penyusutan sekitar 5 persen dari total nilai PDB. Umumnya, penghitungan penyusutan perusahaan di Indonesia menggunakan Metode “garis lurus”, atau mengikuti pola dan struktur barang modal pada masing-masing tahun, meskipun secara empiris, penyusutan sangat dipengaruhi oleh faktor “usia” serta “usai” pemakaian masing-masing barang modal.

5.8 Pajak Tidak Langsung (*neto*)

Pajak merupakan kewajiban pembayaran perusahaan maupun rumah tangga (masyarakat) pada pemerintah. Di sisi lain, pajak akan menjadi bagian dari penerimaan pemerintah. Hanya pajak tidak langsung dan subsidi (*current transaction*) yang terkait dengan perangkat PDB, sedangkan pajak langsung akan dicakup pada komponen yang lain. *Pajak tidak langsung neto* adalah pajak tidak langsung dikurangi subsidi.

a. Konsep dan Definisi

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi oleh unit usaha⁴⁰. Secara tidak langsung, pajak ini dibebankan pada

⁴⁰ Secara langsung pajak tersebut dibayarkan oleh perusahaan

konsumen melalui harga produk yang dijual (dibeli konsumen). Pajak tidak langsung dan subsidi merupakan unsur yang mempunyai transaksi berlawanan. Pajak tidak langsung merupakan penerimaan pemerintah dari masyarakat, sedangkan subsidi merupakan bantuan (transfer) yang diberikan pemerintah pada masyarakat.

b. Metode Penghitungan dan Sumber Data

Informasi tentang pajak tidak langsung dapat diperoleh dari laporan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

5.9 Pendapatan atas Faktor Produksi dari Luar Negeri

Komponen ini merupakan sumber atau bagian dari pendapatan masyarakat domestik, yang secara spesifik menggambarkan tentang aliran transaksi dalam bentuk pendapatan faktorial dari luar negeri dan/atau sebaliknya. Pendapatan faktor produksi merupakan pendapatan yang ditimbulkan karena adanya kepemilikan faktor-faktor produksi di suatu negara, seperti lahan (*land*), modal (*capital*), tenaga kerja (*labor*), serta manajemen (*entrepreneur*). Faktor produksi tersebut digunakan oleh wilayah/negara lain (non-residen) sehingga menimbulkan aliran devisa ke dalam negeri. *Pendapatan neto atas faktor produksi terhadap luar negeri* merupakan selisih pendapatan atas faktor produksi dari luar wilayah domestik yang faktornya dimiliki oleh Indonesia dikurangi dengan pendapatan atas faktor produksi yang berada di wilayah domestik yang faktornya dimiliki oleh luar negeri (non-residen).

a. Konsep Definisi

Pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri merupakan penerimaan atau balas jasa faktor produksi tenaga kerja maupun bukan tenaga kerja (modal/kapital), serta

faktor atau harta kepemilikan lain. Pendapatan dari faktor produksi tenaga kerja berupa kompensasi tenaga kerja berupa upah dan gaji, serta tunjangan lain. Sedangkan pendapatan faktor bukan-tenaga kerja mencakup kompensasi dalam bentuk bunga, deviden, royalti, dan sejenisnya. Transaksi tersebut sering diartikan juga sebagai pendapatan dari investasi. Dengan demikian maka *pendapatan neto atas faktor produksi terhadap luar negeri* merupakan selisih pendapatan atas faktor produksi dari luar wilayah domestik (yang faktor produksinya dimiliki Indonesia) dikurangi pendapatan faktor produksi yang berada di wilayah domestik (yang faktor produksinya dimiliki luar negeri atau non-residen).

b. Metode Penghitungan dan Sumber Data

Nilai pendapatan “neto” luar negeri atas faktor produksi tenaga kerja maupun bukan-tenaga kerja diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri (*Balance of Payment*) Bank Indonesia. Data yang diperoleh masih dalam satuan nilai dolar Amerika (US \$), sehingga harus dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs nilai ekspor dan nilai impor rata-rata tertimbang. Untuk pendapatan faktor produksi yang berasal dari luar negeri dikonversi dengan menggunakan kurs ekspor, sedangkan pendapatan faktor produksi ke luar negeri dikonversikan dengan menggunakan kurs impor. Hasil penghitungan tersebut merupakan estimasi pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri adh Berlaku.

Perkiraan pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri adh Konstan dihitung dengan cara deflasi, yaitu dengan membagi estimasi pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai. Indeks yang digunakan adalah indeks harga per-unit impor dan indeks harga per-unit ekspor.

5.10 Transfer Berjalan (*Current Transfer*)

Merupakan komponen yang akan menjadi koreksi bagi nilai PDB maupun Pendapatan Nasional, yang sifatnya bisa menambah atau bisa pula mengurangi. Untuk memperoleh pendapatan disposabel maka pendapatan nasional harus ditambah dengan transfer berjalan.

a. Konsep dan Definisi

Transfer merupakan proses pendistribusian (pengalokasian) kembali pendapatan faktor yang dimiliki oleh berbagai institusi pada pihak lain secara cuma-cuma, tanpa ada suatu ikatan. Transfer dapat pula diartikan sebagai pemberian yang bersifat tidak wajib sebagai suatu proses redistribusi pendapatan masyarakat yang dilatar-belakangi oleh alasan sosial. Transfer yang dimaksud adalah transfer berjalan (*current transfer*), yang umumnya berupa pemberian hibah atau sumbangan untuk bencana alam, pendidikan, kesehatan dsb.

b. Metode Penghitungan dan Sumber data

Nilai transfer "*neto*" terhadap luar negeri diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri (*Balance of Payment*) Bank Indonesia. Data yang diperoleh masih dalam satuan nilai dolar Amerika (US\$), sehingga harus dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs nilai ekspor dan nilai impor rata-rata tertimbang. Untuk penerimaan transfer yang berasal dari luar negeri dikonversi dengan kurs ekspor, sedangkan untuk pembayaran transfer ke luar negeri dikonversi dengan kurs impor. Nilai hasil estimasi tersebut merupakan perkiraan nilai transfer adh Berlaku.

BAB VI P E N U T U P

1. PDB menurut pengeluaran tahun 2011 s.d 2015 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional. Tiga kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2011 s.d 2015, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro

lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, pendapatan faktorial neto (*factorial income*) dari luar negeri, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

DAFTAR ISTILAH

Domestik

Merupakan batas teritori aktivitas ekonomi, yang hampir mendekati konsep wilayah teritori negara secara hukum (batas administrasi). Istilah domestik merupakan terminologi baku yang digunakan di dalam penyusunan statistik neraca nasional yang memberikan batasan yang jelas tentang kawasan ekonomi penduduk, baik residen maupun non-residen.

Ekspor Barang dan Jasa

Mencakup seluruh penjualan barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lain, yang berlangsung baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam praktek, ekspor terdiri dari barang dagangan dan barang lain yang keluar melalui batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung di negara tersebut oleh non-residen. Karena ekspor barang dagangan dinilai *adh FOB (free on board)*, maka nilai ekspor tidak termasuk biaya angkut dan asuransi sampai ke negara tujuan.

Ekonomi domestik

Merupakan aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam batas wilayah domestik suatu negara. Ekonomi domestik dibedakan dengan luar negeri (*rest of the world*) karena konsep "residen", bukan karena unsur kebangsaan atau mata uang. Ekonomi domestik mencakup aktivitas ekonomi yang diselenggarakan oleh residen. Konsep ini tidak selalu identik dengan batas wilayah administrasi secara politik.

Faktor Produksi

Mencakup faktor yang terlibat dalam aktivitas produksi, baik langsung maupun tidak langsung, seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan.

Pendapatan atas Faktor Produksi dari Luar Negeri

Merupakan pendapatan atau kompensasi yang diterima oleh pemilik atau penguasa faktor produksi, karena terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar batas wilayah domestik.

Harga Berlaku

Penilaian atas barang dan jasa (produk) yang dihasilkan atau dikonsumsi, dengan menggunakan tingkat harga pada tahun berjalan.

Harga Konstan

Penilaian atas barang dan jasa (produk) yang dihasilkan atau dikonsumsi, dengan menggunakan tingkat harga pada tahun dasar tertentu.

Impor Barang dan Jasa

Mencakup seluruh pembelian barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lain, baik berlangsung di dalam wilayah domestik suatu negara maupun di luar negeri. Dalam praktek, impor terdiri dari barang dagangan dan barang lain yang melewati batas pabean, termasuk pembelian langsung oleh residen di luar negeri. Barang dagangan impor juga dinilai secara FOB (*Free on Board*), sehingga nilai barang tersebut tidak termasuk biaya angkut dan asuransi.

Pembentukan Modal Tetap

Mencakup pembuatan dan pembelian barang modal baru, baik dari dalam maupun luar negeri (impor), termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicatat hanya yang dilakukan oleh residen (unit ekonomi domestik) suatu negara/wilayah.

Penyusutan

Merupakan nilai susut suatu barang modal tetap, karena digunakan di dalam proses produksi.

Permintaan Antara

Merupakan permintaan barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi.

Permintaan Akhir

Merupakan permintaan atas barang dan jasa, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, pembentukan modal, maupun ekspor.

Produk

Merupakan output yang dihasilkan melalui proses produksi yang dilakukan oleh

produsen (residen) di dalam batas wilayah domestik suatu negara, pada kurun waktu tertentu. Berbagai jenis produk (disebut juga sebagai komoditas), menurut sifatnya dibedakan atas barang (*good/tangible*) dan jasa (*service/intangible*).

Produk domestik

Merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan untuk konsumsi, investasi dan ekspor di dalam sistem ekonomi domestik, setelah mengeluarkan barang dan jasa yang berasal dari impor. Total penyediaan (*supply*) barang dan jasa di dalam suatu perekonomian dapat berasal dari produk domestik maupun impor.

Residen

Merupakan unit ekonomi yang punya pusat kepentingan ekonomi di dalam batas wilayah suatu negara (*centre of economic interest*). Peran penting ini ditandai oleh dua faktor penting, yaitu tempat tinggal (*dwelling*) dan tempat aktivitas ekonomi, dalam jangka waktu yang relatif panjang, biasanya setahun. Tujuannya untuk membedakan batas teritori suatu negara dari negara lain (*rest of the world*). Unit ekonomi yang bukan residen suatu negara, dianggap sebagai sektor luar negeri (*non-residen*).

Tahun Dasar

Merupakan tahun yang dipilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan di tahun yang lain. Melalui tahun dasar dapat digambarkan series data dengan indikator rinci tentang perubahan atau pergerakan yang terjadi.

Wilayah ekonomi

Merupakan wilayah geografi yang secara administrasi dikelola suatu pemerintahan (negara), di mana manusia, barang dan modal bebas berpindah, yang mencakup wilayah udara, darat maupun perairan. Wilayah ekonomi juga mencakup wilayah khusus seperti kedutaan, konsulat dan pangkalan militer, serta zona bebas aktif (lepas pantai).

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank, *System of National Accounts 2008*, New York, 2009

L a m p i r a n

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

**TABEL 1. PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (MILIAR RUPIAH)
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2011 - 2015**

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3.786.062,9	4.260.075,5	4.768.745,1	5.321.087,6	5.915.741,7	6.453.205,5
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	1.457.599,4	1.638.643,5	1.854.628,9	2.049.781,9	2.248.518,8	2.465.290,3
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	154.222,2	175.860,1	187.041,1	203.088,5	222.284,3	238.872,3
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	516.319,8	569.628,5	637.059,9	705.521,6	780.828,3	867.560,9
d. Kesehatan dan Pendidikan	255.276,9	290.849,9	327.738,0	359.752,4	395.784,7	437.590,4
e. Transportasi dan Komunikasi	894.897,7	993.368,7	1.085.926,2	1.246.466,6	1.416.823,3	1.508.565,7
f. Restoran dan Hotel	337.157,9	385.156,1	443.099,7	499.345,5	565.280,5	617.173,4
g. Lainnya	170.589,1	206.568,8	233.251,3	257.131,1	286.221,7	318.152,6
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	72.758,9	80.529,9	89.585,8	103.929,0	124.242,0	130.936,0
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	618.178,0	709.450,8	796.848,3	908.574,3	996.197,4	1.125.542,4
a. Konsumsi Kolektif	381.063,5	444.288,6	492.963,2	568.131,1	622.774,3	693.307,0
b. Konsumsi Individu	237.114,5	265.162,2	303.885,0	340.443,2	373.423,2	432.235,3
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.127.840,7	2.451.914,0	2.819.026,5	3.051.496,2	3.442.026,9	3.829.978,4
a. Bangunan	1.580.435,0	1.791.932,4	2.053.896,4	2.242.779,8	2.569.122,4	2.886.077,8
b. Mesin dan Perlengkapan	220.377,7	280.002,3	329.147,2	343.132,0	350.148,5	367.612,0
c. Kendaraan	123.094,8	146.579,8	179.038,9	172.446,3	159.331,6	169.448,1
d. Peralatan Lainnya	30.761,1	35.531,1	38.480,5	41.709,1	48.785,8	58.543,2
e. CBR	125.663,4	145.934,1	159.227,3	177.279,6	204.747,1	231.496,9
f. Produk Kekayaan Intelektual	47.508,6	51.934,2	59.236,1	74.149,2	109.891,5	116.800,4
5 a. Perubahan Inventori	129.094,6	131.328,6	202.638,4	178.090,5	210.407,1	158.753,9
b. Diskrepansi Statistik	0,0	4.616,0	-27.181,5	58.391,9	-39.387,1	-186.044,6
6 Ekspor Barang dan Jasa	1.667.917,8	2.061.886,2	2.118.979,0	2.283.776,7	2.497.116,4	2.434.180,6
a. Barang	1.520.295,0	1.890.412,3	1.918.040,0	2.044.358,1	2.223.342,0	2.130.949,6
a.1. Barang Non-migas	1.266.970,7	1.528.931,6	1.572.451,0	1.703.498,9	1.869.262,1	1.884.600,9
a.b. Barang migas	253.324,2	361.480,7	345.589,0	340.859,2	354.079,8	246.348,7
b. Jasa	147.622,9	171.473,9	200.939,0	239.418,5	273.774,4	303.231,0
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.537.719,8	1.868.075,0	2.152.937,0	2.359.212,1	2.580.527,1	2.405.762,4
a. Barang	1.280.688,6	1.596.455,7	1.850.040,0	2.012.939,9	2.177.253,0	1.969.371,0
a.1. Barang Non-migas	1.021.879,5	1.230.537,7	1.439.293,0	1.523.386,0	1.652.354,3	1.635.191,4
a.b. Barang migas	258.809,1	365.918,0	410.747,0	489.553,9	524.898,7	334.179,6
b. Jasa	257.031,2	271.619,3	302.897,0	346.272,2	403.274,1	436.391,4
8 PRODUK DOMESTIK BRUTO	6.864.133,1	7.831.726,0	8.615.704,5	9.546.134,0	10.565.817,3	11.540.789,8

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 2. PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (MILIAR RUPIAH)
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2011 - 2015**

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3.786.062,9	3.977.288,6	4.195.787,6	4.423.416,9	4.651.480,2	4.882.258,7
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	1.457.599,4	1.489.545,2	1.545.635,5	1.612.838,8	1.684.169,9	1.776.284,3
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	154.222,2	162.350,1	172.878,4	182.010,2	190.255,2	197.277,2
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	516.319,8	543.181,1	575.044,0	608.426,7	636.099,7	666.816,7
d. Kesehatan dan Pendidikan	255.276,9	268.833,7	284.508,5	300.791,3	319.311,4	338.991,4
e. Transportasi dan Komunikasi	894.897,7	953.673,9	1.018.099,2	1.085.322,2	1.148.242,3	1.201.170,3
f. Restoran dan Hotel	337.157,9	355.868,5	381.366,6	403.321,4	430.865,5	452.030,5
g. Lainnya	170.589,1	203.836,0	218.255,4	230.706,3	242.536,3	249.688,3
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	72.758,9	76.790,3	81.918,6	88.618,0	99.420,0	98.789,0
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	618.178,0	652.291,7	681.819,0	727.812,1	736.283,1	775.925,1
a. Konsumsi Kolektif	381.063,5	407.985,2	420.887,5	455.890,1	459.596,2	477.301,7
b. Konsumsi Individu	237.114,5	244.306,5	260.931,5	271.922,0	276.686,9	298.623,4
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.127.840,7	2.316.359,1	2.527.728,8	2.654.375,0	2.775.733,6	2.916.601,6
a. Bangunan	1.580.435,0	1.675.388,7	1.811.558,0	1.933.672,0	2.040.386,9	2.167.519,4
b. Mesin dan Perlengkapan	220.377,7	273.416,3	306.654,3	307.782,4	294.159,6	293.214,1
c. Kendaraan	123.094,8	143.012,2	171.258,9	161.592,5	147.968,2	148.816,7
d. Peralatan Lainnya	30.761,1	34.347,7	35.907,6	37.472,1	40.294,3	44.513,0
e. CBR	125.663,4	139.608,7	146.767,2	149.080,2	162.745,5	170.532,0
f. Produk Kekayaan Intelektual	47.508,6	50.585,4	55.582,8	64.775,8	90.179,1	92.006,4
5 a. Perubahan Inventori	129.094,6	118.207,3	174.183,1	124.453,6	156.720,3	112.847,9
b. Diskrepansi Statistik	0,0	1.252,2	30.882,1	57.575,9	88.875,0	56.917,6
6 Ekspor Barang dan Jasa	1.667.917,8	1.914.267,9	1.945.063,7	2.026.113,7	2.046.296,2	2.005.945,0
a. Barang	1.520.295,0	1.746.663,4	1.761.024,3	1.828.150,1	1.842.721,8	1.800.958,4
a.1. Barang Non-migas	1.266.970,7	1.442.177,1	1.479.142,4	1.584.708,7	1.607.800,9	1.541.959,2
a.b. Barang migas	253.324,2	304.486,3	281.881,9	243.441,4	234.920,9	258.999,1
b. Jasa	147.622,9	167.604,6	184.039,4	197.963,5	203.574,5	204.986,7
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.537.719,8	1.768.821,9	1.910.299,5	1.945.867,3	1.988.537,2	1.872.353,5
a. Barang	1.280.688,6	1.495.887,8	1.632.008,0	1.665.064,2	1.705.062,3	1.600.783,8
a.1. Barang Non-migas	1.021.879,5	1.203.514,5	1.326.280,6	1.338.228,7	1.378.479,0	1.280.418,5
a.b. Barang migas	258.809,1	292.373,3	305.727,5	326.835,5	326.583,3	320.365,3
b. Jasa	257.031,2	272.934,0	278.291,5	280.803,2	283.474,9	271.569,7
8 PRODUK DOMESTIK BRUTO	6.864.133,1	7.287.635,3	7.727.083,4	8.156.497,8	8.566.271,2	8.976.931,5

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 3. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2011 - 2015**

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	55,16	54,40	55,35	55,74	55,99	55,92
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	21,24	20,92	21,53	21,47	21,28	21,36
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,25	2,25	2,17	2,13	2,10	2,07
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	7,52	7,27	7,39	7,39	7,39	7,52
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,72	3,71	3,80	3,77	3,75	3,79
e. Transportasi dan Komunikasi	13,04	12,68	12,60	13,06	13,41	13,07
f. Restoran dan Hotel	4,91	4,92	5,14	5,23	5,35	5,35
g. Lainnya	2,49	2,64	2,71	2,69	2,71	2,76
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,06	1,03	1,04	1,09	1,18	1,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,01	9,06	9,25	9,52	9,43	9,75
a. Konsumsi Kolektif	5,55	5,67	5,72	5,95	5,89	6,01
b. Konsumsi Individu	3,45	3,39	3,53	3,57	3,53	3,75
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	31,00	31,31	32,72	31,97	32,58	33,19
a. Bangunan	23,02	22,88	23,84	23,49	24,32	25,01
b. Mesin dan Perlengkapan	3,21	3,58	3,82	3,59	3,31	3,19
c. Kendaraan	1,79	1,87	2,08	1,81	1,51	1,47
d. Peralatan Lainnya	0,45	0,45	0,45	0,44	0,46	0,51
e. CBR	1,83	1,86	1,85	1,86	1,94	2,01
f. Produk Kekayaan Intelektual	0,69	0,66	0,69	0,78	1,04	1,01
5. a. Perubahan Inventori	1,88	1,68	2,35	1,87	1,99	1,38
b. Diskrepani Statistik	0,00	0,06	-0,32	0,61	-0,37	-1,61
6. Ekspor Barang dan Jasa	24,30	26,33	24,59	23,92	23,63	21,09
a. Barang	22,15	24,14	22,26	21,42	21,04	18,46
a.1. Barang Non-migas	18,46	19,52	18,25	17,84	17,69	16,33
a.b. Barang migas	3,69	4,62	4,01	3,57	3,35	2,13
b. Jasa	2,15	2,19	2,33	2,51	2,59	2,63
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	22,40	23,85	24,99	24,71	24,42	20,85
a. Barang	18,66	20,38	21,47	21,09	20,61	17,06
a.1. Barang Non-migas	14,89	15,71	16,71	15,96	15,64	14,17
a.b. Barang migas	3,77	4,67	4,77	5,13	4,97	2,90
b. Jasa	3,74	3,47	3,52	3,63	3,82	3,78
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 4. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2011 - 2015**

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014 *	2015 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	55,16	54,58	54,30	54,23	54,30	54,39
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	21,24	20,44	20,00	19,77	19,66	19,79
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,25	2,23	2,24	2,23	2,22	2,20
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	7,52	7,45	7,44	7,46	7,43	7,43
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,72	3,69	3,68	3,69	3,73	3,78
e. Transportasi dan Komunikasi	13,04	13,09	13,18	13,31	13,40	13,38
f. Restoran dan Hotel	4,91	4,88	4,94	4,94	5,03	5,04
g. Lainnya	2,49	2,80	2,82	2,83	2,83	2,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,06	1,05	1,06	1,09	1,16	1,10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,01	8,95	8,82	8,92	8,60	8,64
a. Konsumsi Kolektif	5,55	5,60	5,45	5,59	5,37	5,32
b. Konsumsi Individu	3,45	3,35	3,38	3,33	3,23	3,33
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	31,00	31,78	32,71	32,54	32,40	32,49
a. Bangunan	23,02	22,99	23,44	23,71	23,82	24,15
b. Mesin dan Perlengkapan	3,21	3,75	3,97	3,77	3,43	3,27
c. Kendaraan	1,79	1,96	2,22	1,98	1,73	1,66
d. Peralatan Lainnya	0,45	0,47	0,46	0,46	0,47	0,50
e. CBR	1,83	1,92	1,90	1,83	1,90	1,90
f. Produk Kekayaan Intelektual	0,69	0,69	0,72	0,79	1,05	1,02
5. a. Perubahan Inventori	1,88	1,62	2,25	1,53	1,83	1,26
b. Diskrepansi Statistik	0,00	0,02	0,40	0,71	1,04	0,63
6. Ekspor Barang dan Jasa	24,30	26,27	25,17	24,84	23,89	22,35
a. Barang	22,15	23,97	22,79	22,41	21,51	20,06
a.1. Barang Non-migas	18,46	19,79	19,14	19,43	18,77	17,18
a.b. Barang migas	3,69	4,18	3,65	2,98	2,74	2,89
b. Jasa	2,15	2,30	2,38	2,43	2,38	2,28
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	22,40	24,27	24,72	23,86	23,21	20,86
a. Barang	18,66	20,53	21,12	20,41	19,90	17,83
a.1. Barang Non-migas	14,89	16,51	17,16	16,41	16,09	14,26
a.b. Barang migas	3,77	4,01	3,96	4,01	3,81	3,57
b. Jasa	3,74	3,75	3,60	3,44	3,31	3,03
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

ISBN: 979-979-064-978-1

